

Laporan Penelitian:

**AKSES MASYARAKAT MISKIN KOTA
TERHADAP PENDIDIKAN DASAR :
STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM MISKIN KOTA MEDAN**

TIM PENELITIAN

**DR. AlRasyidin, M.Ag
DR. Wahyuddinur Nasution, M.Ag
Neliwati, S.Ag, M.Pd**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

Laporan Penelitian:

**AKSES MASYARAKAT MISKIN KOTA
TERHADAP PENDIDIKAN DASAR :
STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM MISKIN KOTA MEDAN**

TIM PENELITI

**DR. AlRasyidin, M.Ag
DR. Wahyuddinnur Nasution, M.Ag
Neliwati, S.Ag. M.Pd**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena penelitian ini telah rampung peneliti lakukan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin.

Penelitian ini tentu banyak menemukan hambatan dan halangan dalam penelusuran berbagai sumber buku bacaan yang dianggap sebagai buku premier, namun karena keseriusan yang sangat dalam dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat relative panjang dari waktu yang telah ditentukan.

Semoga penelitian yang sangat sederhana ini mengenai **Akses Masyarakat Miskin Kota Terhadap Pendidikan Dasar: Studi Pada Masyarakat Muslim Miskin Kota Medan.** Dan semoga penelitian ini bermanfaat, bagi para peneliti yang lain yang tertarik dengan judul penelitian ini.

Akhirnya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan penelitian ini, penulis harapan semoga penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Medan, 5 Desember 2016

DR. AlRasyidin, M.Ag

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Diagram	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitian
BAB II	DESKRIPSI TEORETIK
	A. Masyarakat Miskin Kota
	B. Pendidikan Dasar
	C. Program dan Kebijakan Pemerintah dalam Membuka Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Dasar
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
	A. Metode Penelitian
	B. Lokasi Penelitian
	C. Populasi dan Sample
	D. Sumber Data
	E. Instrumen Penelitian
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
	A. Deskripsi Data
	1. Persepsi Masyarakat Muslim Miskin kota Medan terhadap Pendidikan Dasar

	2. Akses Masyarakat Miskin Kota Medan terhadap Informasi Kebijakan dan Program-Program Pemerintah di Bidang Pendidikan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan	66
	3. Pengalaman Praktis Masyarakat Muslim Miskin Kota Dalam Menyekolahkan Anak pada Jenjang Pendidikan Dasar	78
	4. Harapan dan Saran Masyarakat terhadap Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Institusi Persekolahan, dan Masyarakat dalam Memperluas Akses terhadap Pendidikan Dasar	86
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	94
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran-Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN	
10	Akses masyarakat miskin Kota Medan terhadap Informasi dan Kebijakan	66
11	Tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun	67
12	Sumber informasi masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun	69
13	Tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun	69
14	Sumber informasi masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun	71
15	Tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun	72

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hlm
1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Berdasar Penyebaran Kota dan Desa Tahun 1996-2005	25
2	Jumlah rumah tangga miskin kota Medan berdasarkan wilayah kecamatan	49
3	Perspsi responden tentang urgensi pendidikan dasar	56
4	Manfaat pendidikan dasar	56
5	Alternatif pilihan memasukkan anak ke Sekolah atau Madrasah	59
6	Keinginan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi	61
7	Tanggung jawab pendidikan	62
8	Pilihan responden, menyekolahkan anak atau mencari pekerjaan	64
9	Urgensi pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan	65
10	Akses masyarakat miskin kota Medan tentang informasi wajib belajar 9 tahun	66
11	Tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun	67
12	Sumber informasi masyarakat dalam mengakses informasi dana BOS	69
13	Tingkat pemahaman masyarakat tentang dana BOS	69
14	Sumber informasi masyarakat dalam mengakses kebijakan program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka	71
15	Tingkat pemahaman masyarakat miskin tentang program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka	72

DAFTAR TABEL

Hal	Judul Tabel	Nomor Tabel
22	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Penyebaran Kota dan Desa Tahun 1996-2002	1
49	Jumlah rumah tangga miskin kota Medan berdasarkan wilayah kecamatan	2
50	Perspektif responden tentang urgensi pendidikan dasar	3
50	Motivasi pendidikan dasar	4
59	Alternatif pilihan memasukkan anak ke Sekolah atau Madrasah	5
61	Keinginan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi	6
62	Tanggapan jawab pendidikan	7
64	Pilihan responden menyekolahkan anak atau mencairkan pekerjaan	8
66	Urgensi pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan	9
66	Akses masyarakat miskin kota Medan tentang informasi wajib belajar 9 tahun	10
67	Tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun	11
69	Sumber informasi masyarakat tentang mengakses informasi data BOS	12
69	Tingkat pemahaman masyarakat tentang data BOS	13
71	Sumber informasi masyarakat tentang mengakses keijaksanaan program Kajar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka	14
72	Tingkat pemahaman masyarakat miskin tentang program Kajar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka	15

16	Sumber informasi masyarakat miskin kota Medan dalam mengakses informasi tentang SLT	73
17	Tingkat pemahaman masyarakat miskin kota Medan tentang informasi SLT	75
18	Sumber informasi masyarakat miskin kota Medan dalam mengakses informasi tentang bantuan raskin	75
19	Sumber informasi tentang layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin	77
20	Biaya pendaftaran masuk pendidikan dasar	82
21	Biaya untuk keperluan anak pada tahun pertama di pendidikan dasar	85

DAFTAR DIAGRAM

No	Judul Diagram	Hlm
1.	Tujuan memasukkan anak ke pendidikan dasar	58
2.	Alternatif pilihan memasukkan anak ke SD/SMP atau MI/MTs	60
3.	Persepsi tentang tanggung jawab pendidikan	63
4.	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Wajar 9 Tahun	68
5.	Tingkat pemahaman masyarakat tentang Dana BOS	70
6.	Tingkat pemahaman masyarakat tentang program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka	72
7.	Tingkat pemahaman masyarakat miskin tentang SLT	74
8.	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bantuan raskin	76
9.	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang layanan kesehatan gratis	78
10.	Biaya pendaftaran masuk pendidikan dasar	81
11.	Biaya keperluan anak pada tahun pertama di pendidikan dasar	84
12.	Pengasilan rata-rata responden/ bln	98
13.	Rata-rata jumlah anak/ keluarga	99

DAFTAR DIAGRAM

No	Judul Diagram	Hlm
1.	Tujuan memasukkan anak ke pendidikan dasar	28
2.	Alternatif pilihan memasukkan anak ke SD/SLMP atau MIMTA	60
3.	Persepsi tentang tanggung jawab pendidikan	63
4.	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Wajar 9 Tahun	63
5.	Tingkat pemahaman masyarakat tentang Dasar BOS	70
6.	Tingkat pemahaman masyarakat tentang program Kejur Paket A, Paket B, dan SMP Terpadu	72
7.	Tingkat pemahaman masyarakat miskin tentang SLT	74
8.	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bantuan tunai	76
9.	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang layanan kesehatan gratis	78
10.	Biaya pendidikan masuk pendidikan dasar	81
11.	Biaya kebutuhan anak pada tahun pertama di pendidikan dasar	84
12.	Penghasilan rata-rata responden/ibu	98
13.	Rata-rata jumlah anak/keluarga	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Masalah

Secara konstitusional, UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari iptek, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.¹ Kemudian ditegaskan pula bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.² Berdasar statemen konstitusi tersebut, maka latar belakang sosio-ekonomi sebenarnya tidak boleh menghambat akses seorang warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

Meskipun konsititusi telah menjamin akses setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar, namun fakta empirik memperlihatkan bahwa masih banyak warga negara yang belum bisa memperoleh haknya terhadap pendidikan dasar. Data Susenas

¹ Lihat Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

² Lihat Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang dasar 1945.

tahun 2002 memperlihatkan bahwa sekitar 1,8 juta anak usia 7 – 12 tahun dan 4,8 juta anak usia 13 -15 tahun tidak bersekolah. Data Badan Pusat Statistik tahun 2003 yang dikutip Tatak Prapti Ujijati menunjukkan bahwa 61 % penduduk Indonesia di atas 15 tahun hanya berpendidikan SD ke bawah dan 22 % di antaranya bahkan tidak pernah lulus SD atau tidak sekolah sama sekali.³ Sementara pemerintah sendiri dalam dokumen tentang Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 mengakui bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Pada tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun dan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP keatas masih sekitar 36,2 persen. Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 10,12 persen.⁴

Dalam tataran praktikal, kelompok dominan dalam masyarakat yang seringkali mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya terhadap pendidikan dasar adalah anak-

³ Tatak Prapti Ujijati, 'Reformasi Pendidikan Dasar di Indonesia' dalam Policy Assessment Juni 2005 The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Tersedia online di <http://www.the-indonesianinstitute.com>. diakses pada tanggal 09 Oktober 2007.

⁴ Lihat Bab I Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, h. 3. Tersedia online pada [http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/RPJ M2004-Jan05/&view=Bab 01 \(Agenda Pembangunan Nasional\).pdf](http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/RPJ M2004-Jan05/&view=Bab 01 (Agenda Pembangunan Nasional).pdf)

anak yang berasal dari rumah tangga atau keluarga miskin, tidak terkecuali masyarakat Muslim di kota Medan. Data yang diekspose Unicef melaporkan bahwa dilihat dari pendapatan keluarga, jumlah anak bersekolah dari setiap kelompok keluarga terpaut jauh. Penduduk dengan pendapatan terendah yang jumlahnya 20% dari seluruh penduduk memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) lebih rendah (49,9%) dibandingkan dengan 20% penduduk berpendapatan tertinggi (72,2%).⁵

Apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak yang berasal dari keluarga miskin belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah telah mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun bagi setiap warga negara. Apakah hal ini disebabkan persepsi atau pandangan masyarakat yang kurang positif terhadap urgensi pendidikan dasar bagi kehidupan masa depan anak? Atau apakah hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kebijakan dan program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar kepada masyarakat? Atau, apakah hal ini disebabkan kekeliruan atau kelemahan dalam implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun kepada setiap warga negara? Untuk menemukan jawaban dari serangkaian pertanyaan tersebut dipandang perlu untuk

⁵ Lihat Unicef, *Lembar Fakta: Pendidikan Untuk Anak Perempuan di Indonesia* tersedia online pada http://www.unicef.org/indonesia/id/Facts_sheet diakses pada tanggal 11 Oktober 2007.

dilakukan penelitian ilmiah yang berusaha memotret secara empirik bagaimana akses masyarakat miskin perkotaan di kota Medan terhadap pendidikan dasar.

B. Rumusan Masalah

Secara umum, masalah pokok dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan bagaimanakah akses masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar. Bila dirinci, masalah pokok tersebut meliputi:

1. bagaimana persepsi masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar
2. bagaimana akses masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap informasi kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan bantuan pengentasan kemiskinan
3. bagaimana pengalaman praktis masyarakat Muslim miskin kota Medan dalam menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan dasar
4. apa saran dan harapan masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pemerintah, institusi persekolahan, dan masyarakat untuk memperluas akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis bagaimana akses masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar. Penelitian ini akan memotret implementasi wajib pendidikan dasar 9 tahun di kota Medan, khususnya dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat Muslim miskin di kota Medan terhadap pendidikan dasar.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. bagaimana persepsi masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar
2. bagaimana akses masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap informasi kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan bantuan pengentasan kemiskinan
3. bagaimana pengalaman praktis masyarakat Muslim miskin kota Medan dalam menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan dasar
4. apa saran dan harapan masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pemerintah, institusi persekolahan, dan masyarakat untuk memperluas akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan institusi terkait dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara terhadap pendidikan dasar.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai: (1) bahan kajian dan evaluasi bagi para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan, baik di jajaran birokrasi pendidikan maupun institusi persekolahan atau madrasah, dalam mengimplementasikan dan membantu memenuhi hak-hak seluruh warga negara, terutama masyarakat miskin, terhadap pendidikan dasar secara berkelanjutan, dan (2) bahan pertimbangan bagi organisasi-organisasi sosial keagamaan Muslim dan para *aghniya* atau dermawan Muslim untuk meningkatkan perhatian dan komitmennya dalam membantu warga Muslim miskin dalam memperoleh hak-hak mereka terhadap pendidikan dasar.

BAB II

DESKRIPSI TEORETIK

A. Masyarakat Miskin Kota

1. Masyarakat Perkotaan

Secara etimologi, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang berarti persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau perserikatan.¹ Dari asal kata ini, term masyarakat dapat dimaknai sebagai persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau perserikatan individu-individu ke dalam suatu kesatuan sosial.

Antara desa dan kota secara sepintas kilas hanya mengenai perbedaan geografis saja, tetapi bila dilihat secara mendasar tidaklah demikian. Kota dan desa mempunyai perbedaan yang unik dan kompleks, baik dilihat dari jumlah penduduk, sosial ekonomi, kebudayaan, norma, dan tata nilai.

Menurut Pelly dan Menanti, istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu: (1) 'komunitas' yang menekankan kepada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan (2) 'kelompok' yang menekankan kepada organisasi

¹ Lihat, A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. keempatbelas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 715.

dan pimpinan dari suatu kesatuan manusia.² Karenanya, menurut pengertian ini, lokasi atau wilayah dan organisasi serta pimpinan kelompok merupakan dua syarat mutlak agar suatu kesatuan atau persekutuan manusia dapat disebut sebagai masyarakat.

Dilihat dari aspek geografis atau wilayah, masyarakat dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok sosial, yaitu masyarakat desa (*rural*), masyarakat pinggir kota (*sub urban*), dan masyarakat kota (*urban*). Ketiga kelompok sosial ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari cara hidup (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat istiadat (*custom*), dan nilai-nilai atau norma (*values and norms*) yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial.

Kota adalah pusat pemerintahan negara yang bertingkat-tingkat sesuai dengan sistem administrasi kenegaraan yang berlaku pada suatu negara. Karena itu, kota populer dikenal sebagai ibu kota, baik pada tingkat propinsi atau negara bagian, tingkat kabupaten atau distrik, dan tingkat kecamatan atau region.

Dari sudut kebudayaan, kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan kebudayaan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, komunikasi, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, kehidupan kota cenderung dinamis dan menciptakan jaringan-jaringan kehidupan

² Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-Teori Sosial Budaya* (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdiknas, 1994), h. 30-31.

yang kompleks yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat umumnya.

Karakteristik lainnya dari kota adalah keramaian. Kota umumnya memiliki populasi yang lebih besar dan padat bila dibandingkan dengan desa. Bertambahnya penduduk kota tidak saja disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk asli kota, tetapi juga disebabkan ramainya masyarakat luar kota yang bermigrasi ke kota-kota, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari penghidupan yang lebih layak. Kota telah menarik banyak pendatang, baik dari desa maupun pinggiran kota, setidaknya dikarenakan dua hal: (1) kota menyediakan lebih banyak peluang dan lowongan pekerjaan, dan (2) kota memiliki sarana fasilitas yang lebih lengkap untuk memajukan kehidupan dan peradaban. Karenanya, tidak aneh jika jumlah penduduk kota cepat bertambah. Makin besar pertambahan penduduk dan makin berubah maju teknik dalam kehidupan kota, maka semakin nampak pula ciri kekotaan suatu tempat.

Semakin padat penduduk kota, maka akan semakin tajam tingkat persaingan antar masyarakatnya, baik dalam belajar dan bekerja maupun dalam mencari kerja dan peruntungan dalam kehidupan. Kondisi ini pada gilirannya mendorong terciptanya sikap individualis. Ikatan sosial dan ikatan kekeluargaan semakin renggang, pudar, dan menghilang.

Di sisi lain, kemajuan teknik ikut menentukan struktur hubungan sosial dan kemanusiaan. Di kota-kota besar, di mana perusahaan dan industri berkembang ke arah mekanisasi, hubungan antar buruh dengan majikan menjadi sangat kaku dan kurang humanis. Akhirnya, masyarakat kota hidup di atur oleh perputaran mesin industri dan hubungan yang bersifat untung-rugi.

Karena kota dihuni oleh masyarakat yang multi ras, etnis, dan agama, maka konflik dan pertentangan antar kelompok mudah sekali terjadi. Karenanya tidaklah aneh jika di kota sering terjadi pemberontakan, demonstrasi, maupun pertentangan massa. Walaupun jumlah penduduknya padat, hidup berdekatan satu dengan yang lain, tetapi hubungan di antara mereka terjadi secara mekanistik, kurang akrab dan dingin. Masyarakatnya memang hidup bertetangga, tetapi hubungan kemanusiaan kerap terasa sepi dan hampa. Perasaan malu, enggan, dan takut menjiwai setiap anggotanya (masyarakat kota) dalam menjalin hubungan bertetangga. Semua tali hubungan dijalin secara formal dan kaku. Sifat kerukunan dan gotong royong yang asli dan menjadi tradisi telah menipis, yang diganti dengan sifat individualis dan materialis.

Masyarakat kota cenderung mengarah pada perhitungan untung-rugi. Gotong royong akan eksis manakala diiringi dengan pamrih yang menguntungkan. Dalam kehidupan bertetangga, persaingan diukur dengan materi yang dimiliki. Dalam kondisi

demikian, strata sosial seseorang akan diukur oleh kepemilikan material yang dikuasainya. Bila ada anggota masyarakat yang memiliki kekayaan material, maka masyarakat akan menghormati dan menyanjungnya. Sebaliknya, bila ada anggota masyarakat yang berkehidupan serba kurang atau sengsara, mereka biasanya tidak dihormati dan kedudukannya dipandang rendah oleh masyarakat.

Karena itu, hidup di kota sebenarnya kurang aman dan nyaman bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau material. Rasa duka dan kesulitan hidup harus dipikul sendiri oleh anggota masyarakat yang lemah secara ekonomi. Bukan berarti di kota tidak ada hatawan yang dermawan, namun umumnya uluran tangan dari para tetangga dan orang-orang kaya sangat sulit diharapkan.

Sistem ekonomi, vokasi, dan profesi di kota tidak terpusat pada satu jenis saja, melainkan sangat variatif. Di kota terdapat berbagai macam sistem produksi, baik yang mengolah bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Industri dilakukan secara terus menerus dan besar-besaran, dengan tenaga manusia, mesin, maupun komputer. Di samping itu, jenis vokasi dan profesi di kota juga beraneka ragam. Di kota ada dokter, bankir, kontraktor, pengusaha, guru, pegawai kantor, manajer, direktur, dan berbagai profesi lainnya, tetapi, di samping itu ada juga buruh bangunan, tukang pecel, sopir angkot, becak, ojek,

pedagang kaki lima, pedagang asongan, sampai pengemis dan pengangguran. Disamping itu, di kota juga ditemukan fasilitas pusat hiburan dan perniagaan, seperti supermarket, mall, hotel, dan restoran, di samping juga warung remang-remang dan kios pedagang kaki lima.

Di kota-kota besar, umumnya vokasi dan profesi yang menghasilkan banyak uang adalah pekerjaan yang menuntut pengetahuan dan keahlian khusus. Karenanya, tidak semua warga kota dapat mengaksesnya. Demikian pun, bukan berarti bahwa pekerjaan di kota adalah pekerjaan yang hanya menekankan pada pekerjaan otak saja atau keterampilan tinggi saja, sebab di kota juga masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga kasar saja, seperti tukang sapu, kuli bangunan, tukang becak, dan lain-lain.

Dengan kegiatan ekonomi yang beraneka ragam, kota akhirnya menghasilkan sistem pelapisan sosial. Mereka-mereka yang memiliki keahlian spesialis dan keterampilan tertentu akan mempunyai tingkat upah yang tinggi di dalam sistem kerja yang berlaku dan sekaligus akan menempati struktur sosial yang tinggi dalam masyarakatnya. Demikian sebaliknya, mereka-mereka yang hanya mempunyai modal tenaga saja, akan memperoleh tingkat upah yang rendah dan sekaligus berada pada strata sosial yang rendah dalam masyarakatnya. Dalam sistem kegiatan ekonomi kota, tugas dan pekerjaan pada umumnya dilakukan secara terus

menerus, baik pagi, siang, dan malam. Hal ini merupakan salah satu penyebab hubungan di antara anggota masyarakat kota menjadi renggang dan terbatas.

2. Masyarakat Miskin Kota

Fakta empirik memperlihatkan bahwa kondisi kehidupan individu-individu dalam suatu masyarakat, baik di desa, di pinggir kota, maupun di kota, sangatlah beraneka ragam. Dalam konteks masyarakat kota, meskipun di kota terdapat hampir semua sarana dan fasilitas untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup para penghuninya, namun kenyataan empirik memperlihatkan tetap saja ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dan menyedihkan, bahkan tidak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Kelompok masyarakat inilah yang disebut dengan masyarakat miskin kota.

Secara umum, terminologi masyarakat miskin kota ditujukan untuk menyebutkan kelompok masyarakat yang hidup di kota dalam kondisi serba kekurangan, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan fisik-materialnya. Dalam arti lain, miskin seringkali didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu, keluarga, atau suatu masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya agar ia bisa hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu problema krusial yang muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, baik di kota maupun desa. Dalam sejarah kemanusiaan, kemiskinan merupakan masalah yang kerap hadir dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, yaitu: (1) pendidikan yang terlampau rendah, (2) malas bekerja, (3) keterbatasan sumber alam, (4) terbatasnya lapangan pekerjaan, (5) keterbatasan modal, dan (6) beban keluarga.³

David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi, yaitu: (1) kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, (2) kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, (3) kemiskinan sosial, dan (4) kemiskinan konsekuensial.⁴

Globalisasi umumnya akan menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali menjadi yang pihak yang kalah dan semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat gobalisasi.

³ Lihat H. Hartono dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.329-330.

⁴ David Cox, 'Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in The Asia-Pacific Region' Makalah disampaikan pada *International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia* (Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2004), h. 1-6.

Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, khususnya akibat rendahnya pembangunan telah memunculkan kemiskinan subsistem, seperti kemiskinan pedesaan, yakni kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan, dan kemiskinan perkotaan, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan.

Kemudian kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang dialami anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas. Kemiskinan ini lebih disebabkan faktor ketidakberdayaan secara sosial. Sedangkan kemiskinan konsekuensial adalah kemiskinan yang terjadi akibat kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Menurut Ellis, dimensi kemiskinan itu menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis.⁵ Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur

⁵ Frank Ellis, 'Household Strategies and Rural Livelihood Diversification' dalam *The Journal of Development Studies*, (Vol. 35, No.1), h. 242-245.

secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standard baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membiayai kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per orang per hari, dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.⁶

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Departemen Sosial, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk

⁶ Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial RI, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia* (Jakarta: BPS, 2002), h.4.

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Mereka sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok disini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dimaksud mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu: (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Menurut Oscar Lewis, karakteristik umum yang dapat diidentifikasi dari kehidupan individu, keluarga, atau masyarakat miskin antara lain adalah: (1) tingkat moralitas yang tinggi dan harapan hidup yang rendah, (2) tingkat pendidikan yang rendah, (3) partisipasi yang rendah dalam organisasi-organisasi sosial, (4) tidak atau jarang ambil bagian dalam perawatan medis dan program-program

kesejahteraan lainnya, (5) sedikit saja memanfaatkan fasilitas-fasilitas kota, (6) upah yang rendah dan keamanan kerja yang rendah, (7) tingkat keterampilan kerja yang rendah, (8) tidak memiliki tabungan atau kredit, (9) tidak memiliki persediaan makanan dalam rumah untuk hari esok, (10) kehidupan mereka tanpa *privacy*, (11) sering terjadi tindak kekerasan, termasuk pemukulan anak, (12) perkawinan sering berdasarkan konsensus, sehingga sering terjadi perceraian dan pembuangan anak, (13) keluarga bertumpu pada ibu, (14) kehidupan keluarga otoriter, (15) fatalis, dan (16) besarnya *hypermasculinity complex* di kalangan pria dan *martyr complex* di kalangan kaum wanita.⁷ Hal tersebut pada gilirannya menyebabkan mereka kurang atau tidak mampu memenuhi hajat atau kebutuhan pokok (*basic needs*) dalam kehidupannya, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, apalagi gizi dan pendidikan.

Pendapat lain menyatakan bahwa kemiskinan bisa diidentifikasi dari karakteristik berikut: (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), (2) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), (3) ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), (4) kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individualistik

⁷ Lihat dalam S. Menno dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 60.

maupun massal, (5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam, (6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, (7) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, (8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, (9) dan ketidakmampuan dan ketidak-beruntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).⁸

Dari perspektif yang lebih umum, kemiskinan dapat ditipologikan kepada empat kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.⁹ Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui 'batas kemiskinan' atau 'garis kemiskinan', baik berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, biasanya indikator tersebut dikonversi dalam bentuk uang.

⁸ Suharto et.al, *Menerapkan Pemandu: Perlindungan Masyarakat Miskin Terpadu* (Bandung: STKS Press, 2004), h. 7-8.

⁹ Lihat Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* cet. Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 17.

Adapun kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan 'kondisi umum' suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 100.000,- per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 125.000,- per bulan, secara absolut tidak miskin. Tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 200.000,- per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk miskin.

Kemudian kemiskinan kultural adalah kondisi miskin yang diakibatkan oleh sikap, gaya hidup, nilai, dan orientasi sosial budaya seseorang atau suatu masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern), seperti sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi, fatalis, berorientasi ke masa lalu, dan tidak memiliki jiwa wirausaha.

Selanjutnya, kemiskinan struktural adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi, yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber kehidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Praktik-praktik monopoli dan oligopoli dalam bidang ekonomi misalnya, melahirkan mata rantai 'pemiskinan' yang sulit dipatahkan. Dalam kondisi seperti ini, sekuat apapun motivasi dan

kerja keras seseorang – dalam struktur demikian – tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya.¹⁰

Dalam kasus Indonesia, untuk mengukur garis kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi: (1) kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan (2) kemampuan memenuhi kebutuhan dasar bukan makanan.¹¹ Kebutuhan dasar makanan adalah menyangkut kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan adalah kebutuhan pokok yang menyangkut sandang dan papan. Untuk hidup layak sebagai manusia, individu membutuhkan pakaian guna melindungi tubuh dari teriknya sinar matahari atau dinginnya hujan. Kemudian, untuk hidup layak sebagai manusia, individu juga membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung dan beristirahat. Berdasarkan pendekatan ini, tampak bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan individu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) makanan dan bukan makanan.

Ditilik dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bila diasumsikan suatu rumah tangga memiliki jumlah anggota

¹⁰ *Ibid.*, h.17-18.

¹¹ BPS, 'Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006' dalam *Berita Resmi Statistik* (No. 47/ IX/ 1 September 2006), h. 6.

rata-rata empat orang, maka garis kemiskinan suatu keluarga atau rumahtangga dapat diklasifikasikan kepada tiga tingkatan berikut:

- a. Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 4 x Rp. 120 ribu = Rp. 480 ribu per rumah tangga per bulan.
- b. Rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x Rp. 150 ribu = Rp. 600 ribu per rumah tangga per bulan, tetapi di atas Rp. 480 ribu.
- c. Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x Rp. 175 ribu = Rp. 700 ribu per rumah tangga per bulan, tetapi di atas Rp. 600 ribu.¹²

Dalam konteks pemberian atau penyaluran dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, penentuan rumah tangga atau keluarga miskin didasarkan kepada 14 indikator berikut: (1) luas bangunan, (2) jenis lantai, (3) jenis dinding, (4) fasilitas buang air besar, (5) sumber air minum, (6) sumber penerangan, (7) jenis bahan bakar untuk memasak, (8) frekuensi membeli daging, ayam, dan susu dalam seminggu, (9) frekuensi makan sehari, (10) jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun, (11) akses ke puskesmas/

¹² BPS Provinsi Sumatera Utara, *Pelaksanaan Rumah Tangga Miskin/ Sensus Kemiskinan oleh BPS* (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2005), h. 2.

poliklinik, (12) lapangan pekerjaan, (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan (14) kepemilikan beberapa aset.¹³

3. Potret Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat, terutama setelah dilanda krisis multidimensional yang dimulai sejak tahun 1997. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP, dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3 %) menjadi 49,5 juta (24,2 %) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa. Sementara itu, *International Labour Organization (ILO)* memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk.¹⁴

Data BPS tahun 1999 memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan, yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah

¹³ *Ibid.*, h. 2.

¹⁴ Lihat Badan Pusat Statistik, 'Penduduk Miskin (*Poor Population*)' dalam *Berita Resmi Statistik Penduduk Miskin*, No.04/Th.II/9, (Jakarta: CBS, 1999).

perkotaan. Secara agrergat, presentase peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78 %) dibandingkan dengan perkotaan (4,72 %). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini, secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa.¹⁵

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin yang dibuat BPS dan Depsos, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) di antaranya masuk dalam kategori fakir miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekitar 17,6% dan 7,7%. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin.¹⁶

Fenomena terakhir menunjukkan adanya kecenderungan dimana krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah orang miskin dari yang bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya sejumlah kantor swasta dan pemerintah, dan

¹⁵ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 136.

¹⁶ Suharto Edi, 'Paradigma Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial', Makalah pada Pendidikan dan Pelatihan mengenai Pendekatan Makro dan Mikro dalam Pekerjaan Sosial pada 27 Juli 2004 dan 13 Oktober 2004 (Banten dan Pangkal Pinang, 2004)

dirampingkannya struktur industri formal telah mendorong orang untuk memasuki sektor informal yang lebih fleksibel.

Data BPS menginformasikan bahwa pada tahun 2006, di Indonesia terdapat 39,05 juta (17,75%) penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan). Jumlah ini merupakan peningkatan dari 35,10 juta (15,97%) penduduk miskin pada tahun 2005.¹⁷ Penyebaran masyarakat miskin tersebut bervariasi antar satu daerah dengan daerah lainnya, meskipun umumnya mereka terkonsentrasi di desa-desa. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, sejak tahun 1996 sampai 2005, berdasarkan penyebarannya, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Berdasar Penyebaran Kota dan Desa Tahun 1996-2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97

¹⁷ BPS, 'Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006', *op. cit.*

Sampai bulan Maret tahun 2006, berdasar data yang diekspose dalam *Berita Resmi Statistik*, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 39,05 juta atau 17,75% dari total penduduk. Selama periode Februari 2005 sampai Maret 2006, penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah menjadi 2,06 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 1,89 juta orang.¹⁸

Di Sumatera Utara, dari total penduduk yang berjumlah 12.643.494 jiwa¹⁹ dan 2.713.350 rumah tangga, terdapat 944.487 atau 34,81 % rumah tangga yang diidentifikasi sebagai miskin.²⁰ Bila dilihat penyebarannya berdasarkan wilayah kabupaten/kota, kondisi rumah tangga miskin sampai 31 Mei 2006 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2: Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Miskin dirinci menurut wilayah Kabupaten/ Kota (Kondisi 31 Mei 2006)

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RT Miskin	Persentase RTM terhadap RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Nias	81,242	61,313	75,47
02	Mandailing Natal	93,010	41,818	44,96
03	Tapanuli Selatan	142,604	65,712	46,08
04	Tapanuli Tengah	61,708	35,853	58,10
05	Tapanuli Utara	57,930	24,731	42,69

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Data jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota 2002-2006. Tersedia online pada http://sumut.bps.go.id/pop/2006/pop_05.html. diakses pada tanggal 11 Juli 2007.

²⁰ BPS Provinsi Sumatera Utara, 'Tingkat kemiskinan dan Pengangguran di Sumatera Utara' dalam *Berita Resmi Statistik* (No. 07/03/12/Th. X, 29 Maret 2007), h. 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06	Toba Samosir	41,156	18,529	45,02
07	Labuhan Batu	202,968	57,333	28,25
08	Asahan	233,731	61,885	26,48
09	Simalungun	191,663	65,240	34,04
10	Dairi	58,381	30,311	51,92
11	Karo	87,016	31,665	36,39
12	Deli Serdang	338,225	92,891	27,46
13	Langkat	214,372	96,935	45,22
14	Nias Selatan	49,975	39,328	78,70
15	Humbang Hasundutan	37,417	15,705	41,97
16	Pakpak Bharat	8,591	5,599	65,17
17	Samosir	28,097	17,164	61,09
18	Serdang Bedagai	140,623	45,658	32,47
71	Sibolga	17,214	4,542	26,39
72	Tanjung Balai	32,965	9,269	28,12
73	Pematang Siantar	48,434	11,908	24,59
74	Tebing Tinggi	30,821	5,261	17,07
75	Medan	426,539	87,876	20,60
76	Binjai	51,038	7,656	15,00
77	Padangsidempuan	37,632	10,305	27,38
J u m l a h		2,713,352	944,487	34,81

Sumber: BPS Sumatera Utara, Laporan Pelaksanaan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Tahun 2005.

Catatan:

Kolom (4) adalah jumlah rumah tangga penerima KKB tahap awal dan susulan

Kolom (5) adalah jumlah kolom (4)/ kolom (3) x 100 %

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 2.713.352 jumlah rumah tangga di Sumatera Utara, sebanyak 944.487 atau 34,81% merupakan rumah tangga miskin. Sementara untuk wilayah kota Medan, dari 426.539 rumah tangga, sebanyak 87.876 di antaranya dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RT Miskin	Persentase RT Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Nias	81.242	61.313	75,47
02	Manado	92.016	41.818	45,45
03	Tapanuli Selatan	142.604	62.712	43,98
04	Tapanuli Tengah	61.708	32.821	53,19
05	Tapanuli Utara	37.930	24.731	65,20

B. Pendidikan Dasar

1. Makna, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Dasar

Secara umum, pendidikan adalah suatu proses dimana manusia belum dewasa atau generasi muda dididik, dibimbing, dan dilatih dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai atau sikap mental agar mereka memiliki kapasitas untuk memenuhi tugas dan peranannya di masa depan.

Dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²¹

Kemudian, berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

²¹ Lihat Bab I pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²²

Dalam tataran praktikal, penyelenggaraan pendidikan dibagi kepada tiga jenjang, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang berbentuk SD/MI dan SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.²³

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat dipahami bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang berupaya memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap mental kepada peserta didik untuk dijadikan sebagai bekal atau landasan guna mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan hal itu, maka fungsi pendidikan dasar adalah sebagai 'jembatan' bagi peserta didik yang akan menghubungkannya untuk memasuki jenjang pendidikan menengah. Tanpa mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar, seorang peserta didik tidak akan memiliki akses untuk memasuki dan

²² Lihat Bab II pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²³ Lihat Bab VI pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mengikuti pendidikan pada jenjang menengah. Karena itu, pendidikan dasar merupakan *basic* bagi setiap orang untuk memasuki jenjang pendidikan menengah.

Di Indonesia, sejak awal, pendidikan dasar pada prinsipnya dirancang dengan dua sasaran utama, yaitu: (1) persiapan menuju jenjang pendidikan menengah, dan (2) persiapan untuk hidup dalam masyarakat, antara lain untuk bekerja guna mencari nafkah, bagi mereka yang tidak melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Karena itu, dari sisi tujuan, pelaksanaan pendidikan dasar pada prinsipnya juga mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat, dan (2) membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna untuk kehidupannya dalam masyarakat.²⁴

Dilihat dari makna, fungsi, dan tujuannya, dapat dikemukakan bahwa pendidikan dasar merupakan salah satu kebutuhan pokok (*basic needs*) manusia. Melalui pendidikan dasar, setiap individu diharapkan mendapatkan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan untuk menjalani peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menyadari hal itu,

²⁴ Z. A. Achmady, 'Pengembangan Pendidikan Dasar dalam Pembangunan Jangka Panjang II' dalam *Rumusan Hasil Diskusi Panel Nasional tentang Penyukseasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun* (Malang: Universitas Negeri Malang, 1993), h. 34 dan 36.

negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan perlunya setiap negara memastikan agar pada tahun 2015 semua anak di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.²⁵

2. Hak Warga Negara terhadap Pendidikan Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya, serta memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).²⁶

Secara eksplisit, UUD 1945 menegaskan akan tiga hal. *Pertama*, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. *Kedua*, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. *Ketiga*, pemerintah atau negara wajib menyediakan anggaran dana untuk membiayai warganya mendapatkan haknya terhadap pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Secara eksplisit, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahkan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana

²⁵ Lihat 'Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua' tersedia online pada http://www.bappenas.go.id/.../&view=8/indonesiaMDG_BIGoal2.pdf. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2007.

²⁶ Lihat pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.²⁷ Karena itu, ketidakmampuan dan keterbatasan ekonomi atau finansial tidak boleh menghalangi atau menjadi kendala bagi seorang warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar, karena hal itu merupakan hak semua warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Di negara-negara maju, jaminan pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan dasar mempunyai ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah, (2) diatur dengan undang-undang wajib belajar, (3) tolok ukur keberhasilan program adalah tidak adanya orangtua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah, dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.²⁸

Namun di Indonesia, jaminan pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan dasar belum sejauh itu, tetapi masih dalam konteks *universal primary education*, yakni terbukanya kesempatan secara luas bagi semua peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Dalam makna ini, pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan dasar masih sebatas menumbuhkan kesadaran orangtua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar bagi semua anak yang telah cukup umur (antara 7 sampai 15 tahun).

²⁷ Lihat pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁸ Z. A. Achmady, *op cit.*, h. 36.

Konsekuensinya, sejauh mempunyai kemampuan dari sumber daya (tenaga, biaya, dan sarana), maka pemerintah dituntut menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh peserta didik. Namun, tidak ada keharusan mutlak dari pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua.²⁹

3. Pelaksanaan Pendidikan Dasar

Secara operasional, sama halnya dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pelaksanaan pendidikan dasar juga dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Di lingkungan Departemen Agama, pelaksanaan pendidikan dasar diselenggarakan melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Tsanawiyah (MTs). Berbeda dengan itu, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, pelaksanaan pendidikan dasar diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan persekolahan dan luar sekolah. Untuk jalur pendidikan persekolahan, pelaksanaan pendidikan dasar diselenggarakan melalui jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sedangkan untuk jalur pendidikan luar sekolah, pelaksanaan pendidikan dasar diselenggarakan melalui program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Kejar Paket B dan SMP terbuka. Program Kejar Paket A adalah

²⁹ Lihat Z. A. Achmady, *ibid.*, h. 36.

pendidikan dasar yang setara dengan SD dan Paket B serta SMP terbuka merupakan pendidikan dasar yang setara dengan SLTP.

SD/MI adalah jenjang paling dasar pada jenjang pendidikan formal, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Lama pendidikan dasar pada jenjang MI/SD ini ditempuh peserta didik selama enam tahun. Para peserta didik SD/MI umumnya adalah warga negara yang berusia antara 7 sampai 12 tahun. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SD yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah pusat (Depdiknas) dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

SLTP/MTs adalah lembaga pendidikan formal lanjutan bagi peserta didik setelah mereka lulus SD/MI atau sederajat. Pendidikan pada jenjang SLTP/MTs ini ditempuh peserta didik selama tiga tahun, yang dimulai dari kelas tujuh sampai kelas sembilan. Rata-rata usia peserta didik SLTP/MTs berkisar antara 13-15 tahun. Pada tahun terakhir kelas sembilan, seluruh peserta didik diwajibkan mengikuti ujian nasional (UN) untuk menentukan kelulusan mereka sehingga mereka dinyatakan layak untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan berikutnya, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat. Sama halnya dengan SD Negeri, sejak diberlakukannya otonomi daerah, penyelenggaraan SLTP menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

C. Program dan Kebijakan Pemerintah dalam Membuka Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Dasar

1. Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap warga negara diharapkan dapat mengenyam pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya sehingga memungkinkan bagi pemenuhan perannya di masa depan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya.

Menyadari pentingnya pendidikan, maka sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan wajib pendidikan dasar 6 tahun untuk semua anak umur 7-12 tahun.³⁰ Setelah sepuluh tahun dilaksanakan, yakni kurun waktu 1984-1994, pemerintah kemudian mencanangkan pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, yang meliputi Sekolah Dasar 6 tahun dan SLTP 3 tahun. Menurut Achmady, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan pemerintah memperluas wajib pendidikan dasar dari 6 tahun menjadi 9 tahun. *Pertama*, lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar dan bahkan kurang, yaitu mereka yang putus SD dan buta aksara. *Kedua*, dari segi ekonomi, pendidikan dasar sembilan tahun merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat

³⁰ Z. A. Achmady, *op cit.*, h. 30.

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, ada bukti-bukti kuat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar peluang seseorang untuk lebih mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan negara serta lebih memiliki kesadaran sebagai warga negara beserta hak dan kewajibannya. *Keempat*, dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, sehingga pada gilirannya akan memperbesar peluang untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan makna hidupnya.³¹

Wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun dapat dinyatakan sebagai salah satu program dan upaya pemerintah dalam menerjemahkan amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Secara nasional, Wajar Dikdas 9 tahun dimulai sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Sasaran dan tujuan program Wajar Dikdas 9 tahun adalah memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 12 tahun agar bisa memasuki atau mengikuti pendidikan pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah dan atau yang setara, serta semua warga negara Indonesia yang berusia 13 sampai

³¹ Z. A. Achmady, *ibid.*, h. 31-32.

15 tahun agar bisa memasuki atau mengikuti pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan/atau setara. Secara eksplisit, Inpres Nomor 1 tahun 1994 menegaskan bahwa semua warga negara usia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.

Pada tanggal 9 Juni 2006, dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Instruksi ini ditujukan kepada: (1) Menteri Koordinator bidang kesejahteraan Rakyat, (2) Menteri Pendidikan Nasional, (3) Menteri Dalam Negeri, (4) Menteri Keuangan, (5) Menteri Agama, (6) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, (7) Kepala Badan Pusat Statistik, (8) para Gubernur, dan (9) para Bupati dan Walikota.

Isi instruksi tersebut adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dengan cara: (1) meningkatkan persentase peserta didik SD/MI atau sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008, (2) meningkatkan persentase peserta didik SMP/MTs atau sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka

partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008, dan (3) menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009.³²

Dalam Inpres tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat.

2. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam upaya menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menekan angka putus sekolah (*drop out*), maka sejak tahun 2001 pemerintah mengalihkan sebahagian dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk program pendidikan melalui Program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang Pendidikan. PKPS-BBM ini diluncurkan dengan dua sasaran utama, yaitu: (1) membantu siswa dari keluarga kurang mampu atau keluarga miskin agar mereka tetap bisa memperoleh haknya mengenyam pendidikan dasar 9 tahun, dan (2) mendukung

³² Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang diproyeksikan pemerintah akan dicapai pada tahun ajaran 2008/2009.³³

Dalam tataran operasional, realisasi PKPS-BBM bidang pendidikan ini diimplementasikan dalam bentuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/ SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, serta pondok pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tujuan dari program ini adalah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaannya, dana BOS digunakan untuk: (1) uang formulir pendaftaran, (2) buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, (3) biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dan lain-lain), (4) ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian, (5) membeli bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, (6) membayar biaya perawatan ringan, (7) membayar daya dan jasa, (8) membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer, (9) membiayai kegiatan kesiswaan, seperti

³³ Lihat Dadang Iskandar, "Problematika Penyaluran BOS, dalam *Pikiran Rakyat* (edisi Kamis, 18 Januari 2007).

remedial, pengayaan, ekstrakurikuler, (10) memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transportasi, dan (11) khusus untuk salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.³⁴

Bagi sekolah atau madrasah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada periode sebelum diluncurkannya program BOS, maka sekolah atau madrasah tersebut harus tetap membebaskan peserta didik dari semua bentuk pungutan, sumbangan, atau iuran. Sementara bagi sekolah atau madrasah yang masih memungut iuran pada era sebelumnya, ada dua ketentuan yang diberlakukan: (1) apabila di sekolah atau madrasah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah atau madrasah diwajibkan membebaskan iuran seluruh siswa miskin. Sisa dana BOS, jika masih ada, digunakan untuk mensubsidi siswa lain, dan (2) bagi sekolah atau madrasah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi semua siswa, sehingga dapat mengurangi iuran yang dibebankan kepada orangtua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah atau madrasah.

3. Program Kelompok Belajar Paket A dan Paket B

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 menetapkan bahwa program Kelompok Belajar Paket A dan

³⁴ Lihat Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan BOS* (Jakarta: Diknas dan Depag RI, 20005), h. 5-17.

Kelompok Belajar Paket B merupakan pendidikan luar sekolah yang setara dengan pendidikan dasar. Dalam pasal yang sama ditegaskan pula bahwa program Kejar Paket A setara dengan sekolah dasar dan program Kejar Paket B setara dengan sekolah lanjutan tingkat pertama.

Kebijakan pemerintah mengimplementasikan program Kejar Paket A dan B pada prinsipnya dilatari oleh keinginan untuk membuka akses yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara dalam memperoleh haknya terhadap pendidikan dasar. Dengan kebijakan ini, seseorang yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah, baik karena keharusan membantu orangtua mencari nafkah atau sebab-sebab lainnya, mereka tetap dapat memperoleh pendidikan dasar yang setara dengan pendidikan sekolah melalui jalur pendidikan luar sekolah.

Pada awalnya Kejar Paket A dirancang untuk menjadi alat pemberantasan tiga buta, yaitu buta aksara Latin, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar.³⁵ Dalam kenyataannya, Kejar Paket A memang telah memberikan kontribusi positif dalam pemberantasan tiga buta tersebut. Karenanya, Kejar Paket A telah menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mencermati keberhasilan itu,

³⁵ Soedijarto, 'Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar' dalam *Rumusan Hasil Diskusi Panel* ..., op. cit., h. 53

pemerintah kemudian meluncurkan program Kejar Paket B yang dirancang untuk menyenggarakan pendidikan setara SLTP. Hal ini juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Program SMP Terbuka

Untuk membuka akses yang luas kepada seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah membuka program pendidikan SMP terbuka. Dari sudut yuridis formal, penyelenggaraan SMP terbuka didasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/U/1996 tentang SLTP Terbuka.

Penyelenggara SMP terbuka adalah pemerintah. Tujuan dilaksanakannya SMP terbuka ini adalah untuk menampung siswa-siswa lulusan SD agar bersedia belajar dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga, masalah transportasi, letak geografis daerah, atau keharusan bekerja untuk membantu orangtua dalam mencari nafkah keluarga, tidak lagi menjadi alasan atau hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun.³⁶

³⁶ Lihat 'Depdiknas akan Tuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun pada 2008' tersedia online pada <http://www.kapanlagi.com/t/0000077500.html> diakses pada tanggal 2 Nopember 2007.

Dalam tataran praktikal, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada SMP terbuka adalah: (1) siswa belajar mandiri atau berkelompok, sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dalam satu minggu, yang dibimbing oleh guru pamong di tempat kegiatan belajar (TKB), dan (2) siswa belajar secara tatap muka di kelas pada sekolah induk, sekurang-kurangnya 12 jam pelajaran dalam satu minggu, yang dibimbing oleh guru bina.

Berdasarkan data yang diikhtisarkan Departemen Pendidikan Nasional, sampai tahun 2005, jumlah SMP terbuka yang beroperasi di seluruh Indonesia sebanyak 2843 unit sekolah dengan tempat kegiatan belajar mencapai 12.871 buah dan dengan jumlah peserta didik 328.157 orang yang dibimbing dan dibina oleh 24.100 orang guru. Setelah beroperasi selama sepuluh tahun, SMP terbuka telah memproduksi alumni-alumni yang mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan perguruan tinggi. Meski demikian, sebahagian besar alumni SMP terbuka (93,08%) tidak lagi mampu melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.³⁷

5. Program Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Ketika pada tanggal 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di atas rata-rata 120 %, maka untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan tersebut,

³⁷ Lihat *ibid*.

Dalam tataran praktikal, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada SMP terbuka adalah: (1) siswa belajar mandiri atau berkelompok, sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dalam satu minggu, yang dibimbing oleh guru pamong di tempat kegiatan belajar (TKB), dan (2) siswa belajar secara tatap muka di kelas pada sekolah induk, sekurang-kurangnya 12 jam pelajaran dalam satu minggu, yang dibimbing oleh guru bina.

Berdasarkan data yang diekspose Departemen Pendidikan Nasional, sampai tahun 2005, jumlah SMP terbuka yang beroperasi di seluruh Indonesia sebanyak 2843 unit sekolah dengan tempat kegiatan belajar mencapai 12.871 buah dan dengan jumlah peserta didik 328.157 orang yang dibimbing dan dibina oleh 24.100 orang guru. Setelah beroperasi selama sepuluh tahun, SMP terbuka telah memproduksi alumni-alumni yang mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan perguruan tinggi. Meski demikian, sebahagian besar alumni SMP terbuka (93,08%) tidak lagi mampu melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.³⁷

5. Program Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Ketika pada tanggal 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di atas rata-rata 120 %, maka untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan tersebut,

³⁷ Lihat *ibid.*

pemerintah menggulirkan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin.

Dalam rancangan operasionalisasinya, SLT diberikan kepada rumah tangga miskin yang diidentifikasi BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (*proxy-means testing*).³⁸ Sementara dalam tataran praktikal, sama halnya dengan kriteria yang ditetapkan BPS, penerima SLT juga terdiri dari tiga kelompok masyarakat, yaitu:

- 1: Kelompok sangat miskin, yakni mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 1900 kilo kalori per hari yang senilai dengan Rp. 120.000,- bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp. 480.000,- per rumah tangga per bulan)
- 2: Kelompok miskin, yakni mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2100 kilo kalori per hari yang senilai dengan Rp. 150.000,- bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp. 600.000,- per rumah tangga per bulan)
- 3: Kelompok hampir miskin, yakni mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2300 kilo kalori per hari yang senilai dengan Rp. 175.000,- bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp. 700.000,- per rumah tangga per bulan)

³⁸ Lihat Newsletter Smery, Nomor 17, Januari-Maret 2006.

Setiap rumah tangga dari ketiga kelompok di atas diberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- per bulan yang diberikan tiga bulan sekali selama satu tahun. Pencairan atau penyaluran dana SLT dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Untuk daerah yang sulit menjangkau kantor pos, maka penyaluran SLT kepada masyarakat diantar secara langsung oleh PT Pos Indonesia.

Pada tahun 2007, penyaluran dana SLT dihentikan. Menurut Menteri Sosial, pemerintah telah menyiapkan penggantinya berupa program bantuan kualitas untuk penduduk miskin. Menurutnya, program yang dirancang Bappenas ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.³⁹ Namun, sampai saat penelitian ini dilakukan, realisasi nyata dari rencana program bantuan kualitas untuk penduduk miskin tersebut masih belum terlaksana.

³⁹ Lihat http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita_Nasional&op=detail_berita&id=628. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2007.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mode of inquiry quantitative non-experimental* yakni jenis penelitian yang bertujuan ... *describe something that occurred ... without any direct manipulation of conditions that are experienced*.¹ Pendekatan *mode of inquiry non-experimental* yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, yakni penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok.²

Dalam melakukan survei, *the investigator selects a sample of subjects and administers a questionnaire or conducts interviews to collect data. ... research is designed so that information about a large number of people (population) can be inferred from the responses obtained from a smaler group of subjects (the sample)*.³ Dalam melakukan penelitian survei, peneliti memilih sampel untuk dijadikan objek studi dan menyebarkan angket atau melakukan wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian dirancang agar

¹ James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 2001), h. 33.

² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 3.

³ James H. McMillan dan Sally Schumacher, *op. cit.*, h. 34.

informasi dari sejumlah orang atau sampel yang diteliti dapat disimpulkan berdasarkan respon-respon yang diperoleh dari kelompok kecil subjek atau sampel yang distudi:

Jenis survai yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *survey explorative* atau penjajagan. Hal ini dilatari oleh belum tersedianya data-data formal yang akurat berkenaan dengan topik yang distudi. Karena itu, survai ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data yang cermat tentang akses masyarakat miskin muslim kota Medan terhadap pendidikan dasar.

Dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkah survai yang dilakukan diawali dari penyusunan disain penelitian yang mencakup aktivitas mengidentifikasi dan membatasi ruang lingkup studi, merumuskan tujuan, mengidentifikasi populasi untuk selanjutnya menetapkan sampel, mengkonstruksi instrumen pengumpul data, dan menetapkan teknik analisis data. Setelah itu, disain kemudian didiskusikan dalam seminar proposal penelitian untuk dibahas dan mendapatkan masukan. Setelah perbaikan dan penyempurnaan proposal, langkah berikutnya dilakukan pelatihan pengumpul data lapangan. Pelatihan ini selain ditujukan untuk memudahkan proses pengumpulan data yang dibutuhkan, juga dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian kuesioner atau angket. Setelah itu, maka dilanjutkan proses pengumpulan data lapangan. Setelah semua data bernilai

dihimpun, langkah berikutnya adalah memeriksa dan men-talli seluruh item kuesioner untuk keperluan analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Medan propinsi Sumatera Utara. Secara administratif, kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, yaitu: kecamatan Medan Tuntungan, kecamatan Medan Johor, kecamatan Medan Amplas, kecamatan Medan Denai, kecamatan Medan Area, kecamatan Medan Kota, kecamatan Medan Maimun, kecamatan Medan Polonia, kecamatan Medan Baru, kecamatan Medan Selayang, kecamatan Medan Sunggal, kecamatan Medan Helvetia, kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Barat, kecamatan Medan Timur, kecamatan Medan Perjuangan, kecamatan Medan Tembung, kecamatan Medan Deli, kecamatan Medan Labuhan, kecamatan Medan Marelan, dan kecamatan Medan Belawan.

C. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin kota Medan yang berdomisili pada 21 wilayah kecamatan. Dari

2.067.288 jiwa penduduk kota Medan⁴, berdasarkan data rumah tangga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2007, diketahui bahwa di kota Medan terdapat 87.142 rumah tangga miskin.⁵

Bila dilihat berdasarkan penyebarannya pada setiap kecamatan, maka jumlah rumah tangga miskin di kota Medan adalah sebagaimana tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 2: Jumlah rumah tangga miskin kota Medan berdasarkan wilayah kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
		(3)
(1)	(2)	
01	Kecamatan Medan Tuntungan	2.686
02	Kecamatan Medan Johor	5.112
03	Kecamatan Medan Amplas	4.350
04	Kecamatan Medan Denai	5.035
05	Kecamatan Medan Area	2.373
06	Kecamatan Medan Kota	2.455
07	Kecamatan Medan Maimun	2.283
08	Kecamatan Medan Polonia	1.907
09	Kecamatan Medan Baru	596
10	Kecamatan Medan Selayang	2.813
11	Kecamatan Medan Sunggal	3.520
12	Kecamatan Medan Helvetia	3.250

⁴ Lihat Badan Pusat Statistik, 'Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota 2003-2006' dalam Sumatera Utara Dalam Angka 2006 (Medan: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2007).

⁵ Data diperoleh dari surat resmi Badan Pusat Statistik kota Medan Nomor 127532005 tentang Data Rumah Tangga Miskin (Kondisi 15 Desember 2006) tertanggal 11 Januari 2007.

(1)	(2)	(3)
13	Kecamatan Medan Petisah	1.461
14	Kecamatan Medan Barat	3.323
15	Kecamatan Medan Timur	4.364
16	Kecamatan Medan Perjuangan	4.709
17	Kecamatan Medan Tembung	4.871
18	Kecamatan Medan Deli	4.322
19	Kecamatan Medan Labuhan	6.714
20	Kecamatan Medan Marelan	7.623
21	Kecamatan Medan Belawan	13.375
Jumlah		87.142

Sumber: BPS Kota Medan, 2007

b. Sampel

Sampel area penelitian ini adalah seluruh rumah tangga miskin di Kota Medan. Sedangkan yang dijadikan sebagai sampel studi diambil dari 13 kecamatan dengan sistem penetapan sampel secara acak atau *random*. Adapun 10 kecamatan yang dijadikan sebagai sampel studi tersebut adalah: (1) Kecamatan Medan Labuhan, (2) Kecamatan Medan Johor, (3) Kecamatan Medan Denai, (4) Kecamatan Medan Perjuangan, (5) Kecamatan Medan Tembung, (6) Kecamatan Medan Timur, (7) Kecamatan Medan Sunggal, (8) Kecamatan Medan Barat, (9) Kecamatan Medan Helvetia, dan (10) Kecamatan Medan Area.

Dari masing-masing kecamatan di atas, ditetapkan sebanyak 25 rumah tangga sebagai responden penelitian. Dengan demikian, seluruh sampel penelitian ini terdiri dari 250 rumah tangga miskin.

(1)	(2)	(3)
1	Kecamatan Medan Barat	1
2	Kecamatan Medan Barat	2
3	Kecamatan Medan Barat	3
4	Kecamatan Medan Barat	4
5	Kecamatan Medan Barat	5
6	Kecamatan Medan Barat	6
7	Kecamatan Medan Barat	7
8	Kecamatan Medan Barat	8
9	Kecamatan Medan Barat	9
10	Kecamatan Medan Barat	10
11	Kecamatan Medan Barat	11
12	Kecamatan Medan Barat	12
13	Kecamatan Medan Barat	13
14	Kecamatan Medan Barat	14
15	Kecamatan Medan Barat	15
16	Kecamatan Medan Barat	16
17	Kecamatan Medan Barat	17
18	Kecamatan Medan Barat	18
19	Kecamatan Medan Barat	19
20	Kecamatan Medan Barat	20
21	Kecamatan Medan Barat	21
22	Kecamatan Medan Barat	22
23	Kecamatan Medan Barat	23
24	Kecamatan Medan Barat	24
25	Kecamatan Medan Barat	25
26	Kecamatan Medan Barat	26
27	Kecamatan Medan Barat	27
28	Kecamatan Medan Barat	28
29	Kecamatan Medan Barat	29
30	Kecamatan Medan Barat	30
31	Kecamatan Medan Barat	31
32	Kecamatan Medan Barat	32
33	Kecamatan Medan Barat	33
34	Kecamatan Medan Barat	34
35	Kecamatan Medan Barat	35
36	Kecamatan Medan Barat	36
37	Kecamatan Medan Barat	37
38	Kecamatan Medan Barat	38
39	Kecamatan Medan Barat	39
40	Kecamatan Medan Barat	40
41	Kecamatan Medan Barat	41
42	Kecamatan Medan Barat	42
43	Kecamatan Medan Barat	43
44	Kecamatan Medan Barat	44
45	Kecamatan Medan Barat	45
46	Kecamatan Medan Barat	46
47	Kecamatan Medan Barat	47
48	Kecamatan Medan Barat	48
49	Kecamatan Medan Barat	49
50	Kecamatan Medan Barat	50
51	Kecamatan Medan Barat	51
52	Kecamatan Medan Barat	52
53	Kecamatan Medan Barat	53
54	Kecamatan Medan Barat	54
55	Kecamatan Medan Barat	55
56	Kecamatan Medan Barat	56
57	Kecamatan Medan Barat	57
58	Kecamatan Medan Barat	58
59	Kecamatan Medan Barat	59
60	Kecamatan Medan Barat	60
61	Kecamatan Medan Barat	61
62	Kecamatan Medan Barat	62
63	Kecamatan Medan Barat	63
64	Kecamatan Medan Barat	64
65	Kecamatan Medan Barat	65
66	Kecamatan Medan Barat	66
67	Kecamatan Medan Barat	67
68	Kecamatan Medan Barat	68
69	Kecamatan Medan Barat	69
70	Kecamatan Medan Barat	70
71	Kecamatan Medan Barat	71
72	Kecamatan Medan Barat	72
73	Kecamatan Medan Barat	73
74	Kecamatan Medan Barat	74
75	Kecamatan Medan Barat	75
76	Kecamatan Medan Barat	76
77	Kecamatan Medan Barat	77
78	Kecamatan Medan Barat	78
79	Kecamatan Medan Barat	79
80	Kecamatan Medan Barat	80
81	Kecamatan Medan Barat	81
82	Kecamatan Medan Barat	82
83	Kecamatan Medan Barat	83
84	Kecamatan Medan Barat	84
85	Kecamatan Medan Barat	85
86	Kecamatan Medan Barat	86
87	Kecamatan Medan Barat	87
88	Kecamatan Medan Barat	88
89	Kecamatan Medan Barat	89
90	Kecamatan Medan Barat	90
91	Kecamatan Medan Barat	91
92	Kecamatan Medan Barat	92
93	Kecamatan Medan Barat	93
94	Kecamatan Medan Barat	94
95	Kecamatan Medan Barat	95
96	Kecamatan Medan Barat	96
97	Kecamatan Medan Barat	97
98	Kecamatan Medan Barat	98
99	Kecamatan Medan Barat	99
100	Kecamatan Medan Barat	100

Kriteria rumah tangga miskin yang dijadikan sampel adalah: (1) beragama Islam, (2) memiliki anak yang sedang bersekolah pada pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs sederajat, (3) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2006 sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik kota Medan tahun 2007.

D. Sumber Data

Data penelitian ini dijamin dari penduduk kota Medan yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin. Dari seluruh rumah tangga miskin yang dijadikan sampel, sumber data diperoleh dari kepala keluarga, yaitu ayah untuk keluarga yang masih utuh suami-isteri, ibu untuk keluarga yang sudah ditinggal wafat suami, dan ayah untuk keluarga yang sudah ditinggal wafat isteri.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang berisikan sejumlah pertanyaan tertulis berkenaan dengan akses keluarga miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar. Kuesioner atau angket dikonstruksi sendiri peneliti dengan mengacu pada empat indikator, yaitu: (1) persepsi-pandangan keluarga miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar; (2) sosialisasi kebijakan atau program pendidikan dan bantuan dari pemerintah terhadap rumah tangga miskin yang meliputi: (a) wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;

(b) program kejar Paket A dan B, (c) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan (d) Subsidi Langsung Tunai-SLT; (3) pengalaman praktis yang pernah dilalui dalam menyekolahkan anak pada pendidikan dasar; (4) saran dan harapan keluarga miskin untuk membuka atau memperluas akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar.

Bentuk kuesioner yang digunakan adalah angket semi terbuka (*open-ended questionnaire*). Bentuk ini sengaja dipilih untuk memberi peluang atau kesempatan kepada responden guna memilih atau menuliskan sendiri secara langsung jawaban tambahan⁶ ketika beberapa alternatif jawaban yang disediakan belum atau tidak sesuai dengan keadaan responden yang sesungguhnya. Dengan demikian, terbuka peluang yang lebih besar untuk menjangkau data yang lebih akurat dan mendalam.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu mentransformasikan seluruh data tentang akses masyarakat miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar ke dalam susunan yang dapat menggambarkan atau mencirikan kondisi mereka yang sesungguhnya. Untuk itu digunakan tabel-tabel

⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *ibid.*, hlm. 178.

distribusi frekuensi (*distribution frequency*). Hal ini selain dimaksudkan untuk mempermudah penyajian dan interpretasi data, juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami temuan penelitian. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan secara lebih rinci akses masyarakat miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar, maka digunakan pengukuran tendensi sentral dengan menggunakan nilai rerata (*mean*). Setelah dideskripsikan, analisis data kemudian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini diawali dengan mencermati temuan lapangan kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang relevan dan berbagai kebijakan menyangkut pendidikan dasar.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Bab ini akan mendeskripsikan empat hal. *Pertama*, persepsi masyarakat miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar ditinjau dari persepsi mereka tentang: (a) tujuan memasukkan anak ke pendidikan dasar, (b) manfaat pendidikan dasar, (c) alternatif pilihan memasukkan anak ke Lembaga Pendidikan Umum (SD dan SMP) atau ke Lembaga Pendidikan Islam (MI dan MTs), (d) urgensi pendidikan dasar bagi anak, (e) tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan dasar, (f) keinginan melanjutkan sekolah bagi anak ke jenjang yang lebih tinggi, (g) keutamaan mencari kerja atau melanjutkan sekolah anak, dan (h) urgensi pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan.

Kedua, akses masyarakat miskin kota Medan terhadap informasi kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan pemberian bantuan pengentasan kemiskinan yang meliputi: (a) wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, (b) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (c) Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka, (d) Subsidi Langsung Tunai (SLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan

Bakar Minyak (BBM), (e) bantuan beras miskin, dan (f) layanan kesehatan gratis.

Ketiga, pengalaman praktis masyarakat miskin kota Medan dalam menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan dasar, dan *keempat*, saran dan harapan masyarakat miskin kota Medan terhadap pemerintah, departemen pendidikan nasional, departemen agama, institusi persekolahan, dan masyarakat untuk memperluas akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar:

1. Persepsi Masyarakat Muslim Miskin kota Medan terhadap Pendidikan Dasar

Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Karenanya, sebanyak 86,4% dari keseluruhan responden berpendapat bahwa pendidikan dasar sangat perlu untuk menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi masa depan dan 8,00% menyatakan perlu meskipun mereka tidak memiliki biaya. Dari keseluruhan responden, hanya 1,20% yang menyatakan pendidikan dasar tidak perlu dikarenakan banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, 4,00% menyatakan kurang bermanfaat karena banyaknya tamatan pendidikan dasar yang sulit mendapatkan pekerjaan. Secara rinci, data tentang hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Perspesi responden tentang urgensi pendidikan dasar

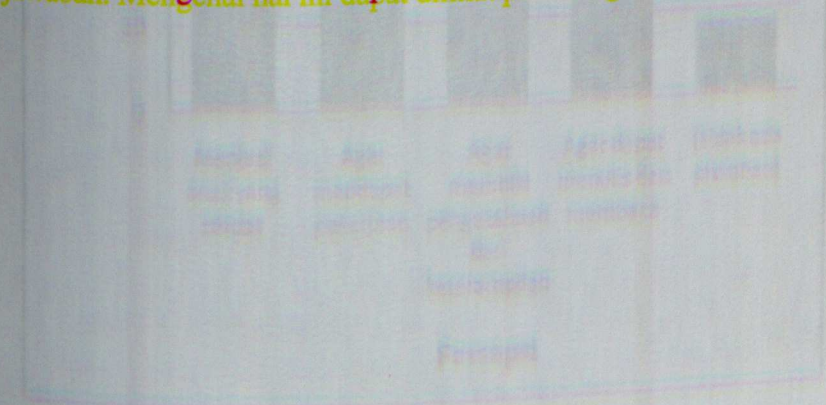
No	Urgensi	Frekuensi	Persentase
1	Sangat perlu, untuk bekal masa depan anak	216	86,40
2	Kurang perlu, karena banyak tamatannya yang menganggur	10	4,00
3	Tidak perlu, pendidikan banyak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya	3	1,20
4	Sebenarnya perlu, namun tidak ada biaya. Sehingga anak tidak bisa bersekolah	20	8,00
5	(tidak ada jawaban)	1	0,40
Total		250	100,00

Dalam konteks manfaat pendidikan dasar, umumnya responden (36%) menyatakan bahwa pendidikan dasar berguna bagi mempersiapkan diri anak menjadi manusia yang berguna bagi orangtua, agama, nusa, dan bangsa, 27,6% menyatakan bermanfaat guna mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh pekerjaan, 26,8% menyatakan untuk membentuk diri anak menjadi pribadi yang baik, 8,8% menyatakan tidak tahu, dan 0,8% tidak memberi jawaban. Mengenai hal ini, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Manfaat pendidikan dasar

No	Manfaat	Frekuensi	Persentase
1	Berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa	90	36,00
2	Memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan	69	27,60
3	Kepribadian anak dapat dibentuk menjadi pribadi yang baik	67	26,80
4	Tidak tahu, karena tamat pendidikan dasar belum bisa mendapat pekerjaan yang layak	22	8,80
5	(tidak ada jawaban)	2	0,80
Total		250	100,00

Berkaitan dengan tujuan responden memasukkan anaknya ke pendidikan dasar, diperoleh jawaban yang variatif. Sebanyak 129 responden atau 51,6% menyatakan agar anak mereka menjadi manusia yang cerdas, 47 orang responden atau 18,8% menyatakan agar dapat menulis dan membaca, 32 orang responden atau 12,8% menyatakan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan, 25 orang responden atau 10% menyatakan agar bisa mendapatkan pekerjaan, dan hanya 17 orang responden atau 6,8% yang tidak memberikan jawaban. Mengenai hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1.7 Grafik batang terkait ke pendidikan dasar

Dalam hal memasukkan anak ke pendidikan dasar, hasil yang didapatkan dari kuesioner yang telah disebarluaskan kepada responden, serta data wawancara yang telah dilakukan peneliti (2021) dapat dilihat pada Gambar 1.7. Dari 250 responden, sebanyak 129 atau 51,6% menyatakan agar anaknya menjadi manusia yang cerdas, 47 atau 18,8% menyatakan agar dapat menulis dan membaca, 32 atau 12,8% menyatakan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan, 25 atau 10% menyatakan agar bisa mendapatkan pekerjaan, dan 17 atau 6,8% yang tidak memberikan jawaban.

Tabel 3. Persentase responden terkait ke pendidikan dasar

No	Jumlah Responden	Persentase
1	129	51,6%
2	47	18,8%
3	32	12,8%
4	25	10%
5	17	6,8%
Total	250	100%

Diagram berikut menunjukkan hasil dari kuesioner yang telah disebarluaskan kepada responden, serta data wawancara yang telah dilakukan peneliti (2021). Dari 250 responden, sebanyak 129 atau 51,6% menyatakan agar anaknya menjadi manusia yang cerdas, 47 atau 18,8% menyatakan agar dapat menulis dan membaca, 32 atau 12,8% menyatakan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan, 25 atau 10% menyatakan agar bisa mendapatkan pekerjaan, dan 17 atau 6,8% yang tidak memberikan jawaban. Mengenai hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:

Tabel 4. Persentase pendidikan dasar

No	Jumlah Responden	Persentase
1	129	51,6%
2	47	18,8%
3	32	12,8%
4	25	10%
5	17	6,8%
Total	250	100%

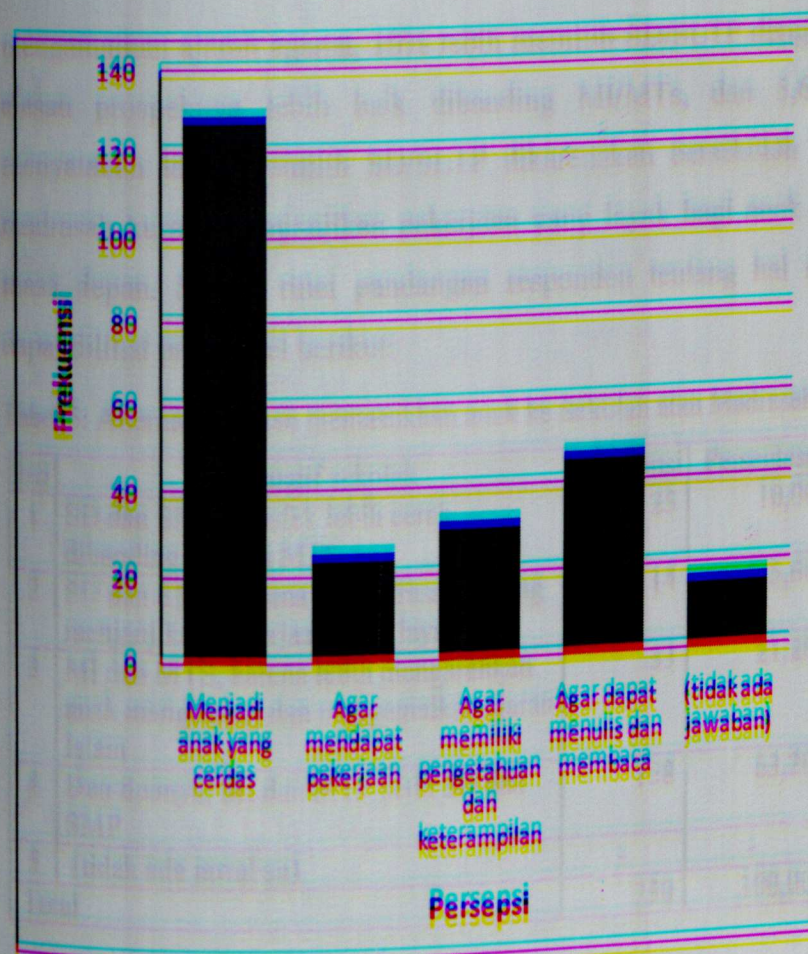


Diagram 1: Tujuan memasukkan anak ke pendidikan dasar

Dalam hal menyekolahkan anak ke pendidikan dasar, bagi responden, sama saja memasukan anak ke lembaga pendidikan Islam (MI/MTs) atau ke lembaga pendidikan umum (SD/SLTP). Dari 250 responden, sebanyak 63,2 % berpendapat demikian. Selebihnya, 21,2% menyatakan lebih memilih MI/MTs dikarenakan lebih mengarahkan anak untuk mengetahui dan

mengamalkan ajaran agama, 10% lebih memilih SD/SLTP dengan alasan prospeknya lebih baik dibanding MI/MTs, dan 5,6% menyatakan lebih memilih SD/SLTP dikarenakan bersekolah di madrasah kurang menjanjikan pekerjaan yang layak bagi anak di masa depan. Secara rinci pandangan responden tentang hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5: Alternatif pilihan memasukkan anak ke Sekolah atau Madrasah

No	Alternatif sekolah	Frekuensi	Persentase
1	SD dan SMP, prospek lebih cerah dibanding MI dan MTs	25	10,00
2	SD dan SMP, karena di Madrasah kurang menjanjikan pekerjaan yang layak	14	5,60
3	MI dan MTs, karena lebih mengarahkan anak mengetahui dan mengamalkan ajaran Islam	53	21,20
4	Dua-duanya, MI dan MTs, serta SD dan SMP	158	63,20
5	(tidak ada jawaban)	=	=
Total		250	100,00

Dalam bentuk diagram, gambaran mengenai alternatif pilihan menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan agama atau umum bisa dilihat melalui diagram berikut:

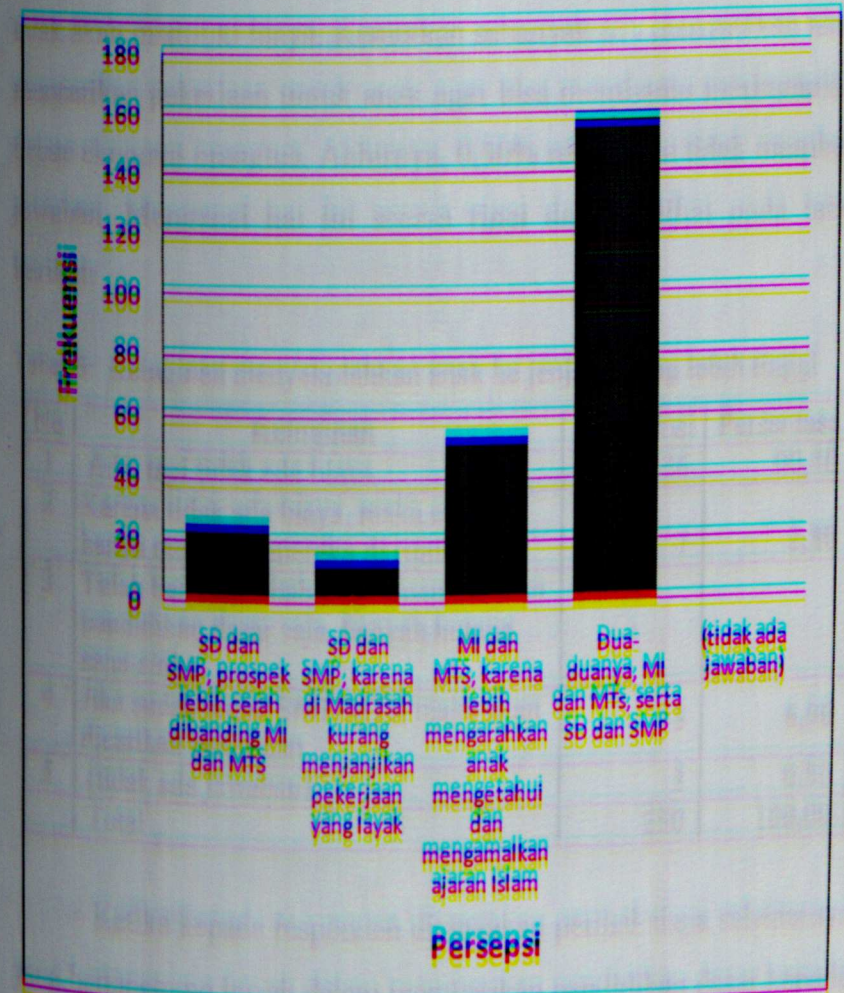


Diagram 2: Alternatif pilihan memasukkan anak ke SD/SMP atau MI/MTs

Setelah menamatkan pendidikan dasar, mayoritas atau 90,4% responden menyatakan sangat berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meskipun dengan kekhawatiran tidak akan memiliki biaya. Selebihnya, sebanyak 2,8% menyatakan akan mendidik anaknya di rumah saja, dikarenakan yakin

tidak akan memiliki biaya. Kemudian sebanyak 6% menyatakan akan mencari pekerjaan untuk anak agar bisa membantu meringankan beban ekonomi orangtua. Akhirnya, 0,50% responden tidak memberi jawaban. Mengenai hal ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6: Keinginan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi

No	Keinginan	Frekuensi	Persentase
1	Ada, tapi tidak ada biaya	226	90,40
2	Karena tidak ada biaya, maka cukup hanya mendidik mereka di rumah saja	7	2,80
3	Tidak berniat, sebab untuk menamatkan pendidikan dasar saja, banyak hutang sana-sini	=	=
4	Jika sudah tamat SMP/MTs, maka akan dicarikan pekerjaan	15	6,00
5	(tidak ada jawaban)	2	0,80
	Total	250	100,00

Ketika kepada responden ditanyakan perihal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dasar kepada anak, sebanyak 63,6% menyatakan bahwa orangtua, sekolah, dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Selebihnya, sebanyak 24,8% menyatakan orangtua yang bertanggung jawab, karena anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada mereka. Kemudian 11,6% menyatakan pemerintah yang bertanggung jawab dengan alasan merupakan amanah konstitusi atau Undang-

Undang Dasar. Secara rinci jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7: Tanggung jawab pendidikan

No	Tanggung jawab	Frekuensi	Persentase
1	Orang tua, karena menerima amanah langsung dari Allah	62	24,80
2	Pemerintah, karena undang-undang	29	11,60
3	Sekolah	=	=
4	Ketiganya, yaitu orang tua, sekolah dan masyarakat	159	63,60
5	(tidak ada jawaban)	=	=
	Total	250	100,00

Dalam bentuk diagram, jawaban responden tersebut bisa divisualisasikan sebagai berikut:

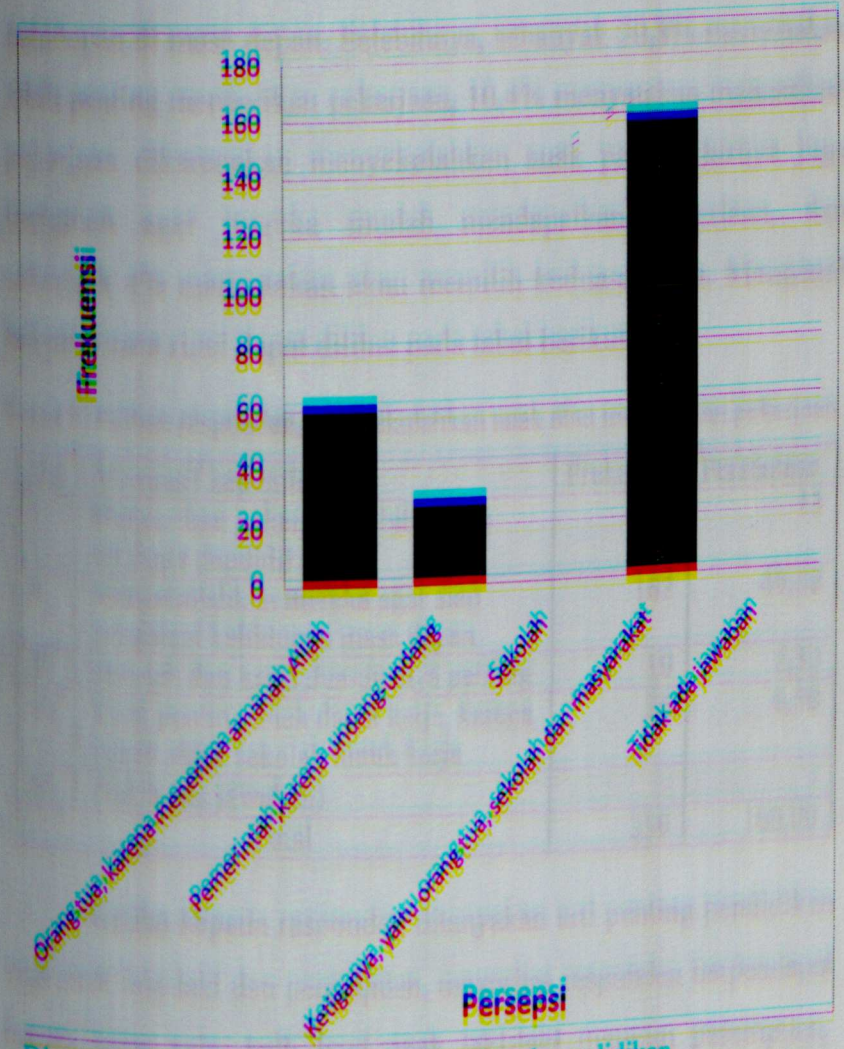


Diagram 3: Persepsi tentang tanggung jawab pendidikan

Selanjutnya, ketika harus memilih apakah menyekolahkan anak ke pendidikan dasar atau mencari pekerjaan untuk mereka, mayoritas atau 64,8% responden menyatakan lebih memilih menyekolahkan anak ke pendidikan dasar karena pendidikan dasar akan membekali anak dengan pengetahuan untuk menjalani

kehidupan di masa depan. Selebihnya, sebanyak 20,8% menyatakan lebih penting mencari pekerjaan, 10,4% menyatakan mencari pekerjaan dikarenakan menyekolahkan anak pada akhirnya juga bertujuan agar mereka mudah mendapatkan pekerjaan, dan sebanyak 4% menyatakan akan memilih kedua-duanya. Mengenai hal ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8: Pilihan responden, menyekolahkan anak atau mencari pekerjaan

No	Alternatif kepentingan	Frekuensi	Persentase
1	Mencari pekerjaan lebih utama daripada pendidikan	52	13
2	Menyekolahkan mereka agar siap menjalani kehidupan masa depan	162	40,50
3	Sekolah dan kerja dua-duanya penting	10	2,50
4	Yang penting anak dapat kerja, karena tujuan akhir sekolah untuk kerja	26	6,50
5	(tidak ada jawaban)	=	=
Total		250	100,00

Ketika kepada responden ditanyakan arti penting pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan, mayoritas responden berpendapat bahwa sama saja, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan, keduanya tidak hanya membutuhkan pendidikan dasar, tetapi sedapat mungkin sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karenanya, sebanyak 213 responden atau 85,2% menyatakan bahwa sedapat mungkin mereka akan menyekolahkan anak laki-laki dan perempuannya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selebihnya, sebanyak 17 responden atau 6,8% menyatakan untuk

anak perempuan hanya penting mendapatkan pendidikan dasar, setelah itu mereka akan segera mencari jodoh untuk anaknya. Pendapat hampir serupa dinyatakan 14 responden atau 5,6% mengenai anak laki-laki. Menurut mereka, anak laki-laki perlu mendapatkan pendidikan dasar. Setelah tamat, mereka akan mencari pekerjaan agar anak laki-lakinya bisa membantu ekonomi rumah tangga keluarga. Akhirnya, dari keseluruhan responden sebanyak 6 responden atau 2,4% menyatakan bahwa baik bagi anak laki-laki maupun perempuan, pendidikan itu penting dan tidak terbatas hanya pada jenjang pendidikan dasar, tetapi sampai jenjang yang lebih tinggi. Karenanya, mereka menyatakan akan terus menyekolahkan anak laki-laki dan perempuan mereka sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika ada bantuan dari pemerintah. Secara rinci mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9: Urgensi pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setamat pendidikan dasar, sedapat mungkin akan menyekolahkan keduanya sampai ke jenjang pendidikan tinggi	213	85,20
2	Anak perempuan memerlukan pendidikan dasar, setelah tamat akan dicari jodoh	17	6,80
3	Anak laki-laki perlu mendapatkan pendidikan dasar, setelah tamat akan dicari pekerjaan	14	5,60
4	Pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar, karenanya anak laki-laki dan perempuan akan disekolahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi jika ada bantuan dari pemerintah	26	6,50
Total		250	100,00

2. Akses Masyarakat Miskin Kota Medan terhadap Informasi Kebijakan dan Program-Program Pemerintah di Bidang Pendidikan Dasar dan Bantuan bagi Masyarakat Kemiskinan

2.1 Akses Masyarakat Miskin Kota Medan terhadap Informasi Kebijakan dan Program-Program Pemerintah di Bidang Pendidikan Dasar

Berdasarkan data angket, akses masyarakat miskin Kota Medan terhadap informasi tentang kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar dapat dideskripsikan sebagai berikut.

2.1.1. Akses Masyarakat Miskin Kota Medan terhadap Informasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun

Kebijakan pemerintah di bidang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun umumnya diakses masyarakat miskin dari media televisi. Mengenai hal ini, secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10: Akses masyarakat miskin kota Medan tentang informasi wajib belajar 9 tahun

No.	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase
1.	Televisi	184	73,60
2.	Surat Kabar	8	3,20
3.	Tetangga	37	14,80
4.	Kepling / Petugas Kelurahan	21	8,40
Jumlah		250	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa informasi tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagian besar diakses melalui televisi yang mencapai 73,6 %. Kemudian jawaban responden yang mengakses informasi kebijakan tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui tetangga sebanyak 14,8 %, melalui kepala lingkungan sebanyak 8,4 %, dan melalui surat kabar sebanyak 3,2 %.

Kemudian, berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 11: Tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar 9 tahun

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat baik	102	40,8
2.	Baik	85	34,0
3.	Cukup	60	24,0
4.	Kurang	3	1,2
Total		250	100,0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berada pada kategori sangat baik sebanyak 40,8 %, kategori baik 34,0 %, kategori cukup 24 %, dan yang berada pada kategori kurang hanya 1,2 %. Tingkat pengetahuan itu diukur dari pemahaman masyarakat tentang pengertian, tujuan, dan tata cara mengakses pendidikan dasar 9 tahun. Diagram yang menggambarkan hal ini adalah sebagai berikut:

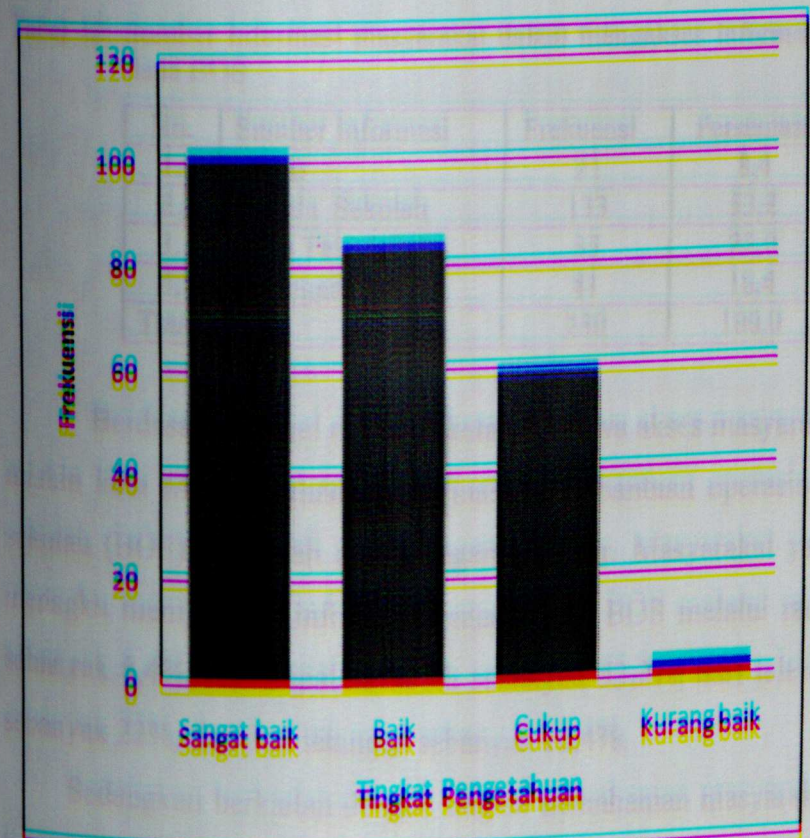


Diagram 4: Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Wajar 9 Tahun

2.1.2. Akses Masyarakat Miskin Kota Medan terhadap Informasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Para orang tua umumnya sudah mengetahui tentang adanya dana bantuan operasional sekolah. Berdasarkan angket yang telah diberikan kepada responden, diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat miskin kota Medan tentang dana BOS cukup baik. Umumnya masyarakat mengakses informasi tentang dana BOS dari kepala Sekolah. Mengenai hal ini dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12: Sumber informasi masyarakat dalam mengakses informasi dana BOS

No.	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase
1.	Radio	21	8,4
2.	Kepala Sekolah	133	53,2
3.	Iklan Televisi	55	22,0
4.	Tetangga	41	16,4
Total		250	100,0

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa akses masyarakat miskin kota Medan terhadap informasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) diperoleh dari beragam sumber. Masyarakat yang menagku memperoleh informasi tentang dana BOS melalui radio sebanyak 8,4%, dari kepala sekolah sebanyak 53,2%, dari televisi sebanyak 22%, dan dari tetangga sebanyak 16,4%.

Sedangkan berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang dana BOS tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13: Tingkat pemahaman masyarakat tentang dana BOS

No.	Tingkat Pemahaman	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat baik	60	24,00
2.	Baik	11	4,40
3.	Cukup	103	41,00
4.	Kurang	74	29,60
Jumlah		250	100,0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa umumnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai dana BOS berada pada kategori cukup baik. Tingkat pengetahuan itu dilihat dari pemahaman mereka

tentang apa itu dana BOS, prosedur atau tata cara mendapatkan dana BOS, beaaran dana BOS yang diterima seorang siswa, dan peruntukan atau penggunaan dana BOS. Dalam bentuk diagram, tingkat pengetahuan masyarakat tentang dana BOS dapat divisualisasikan sebagai berikut:

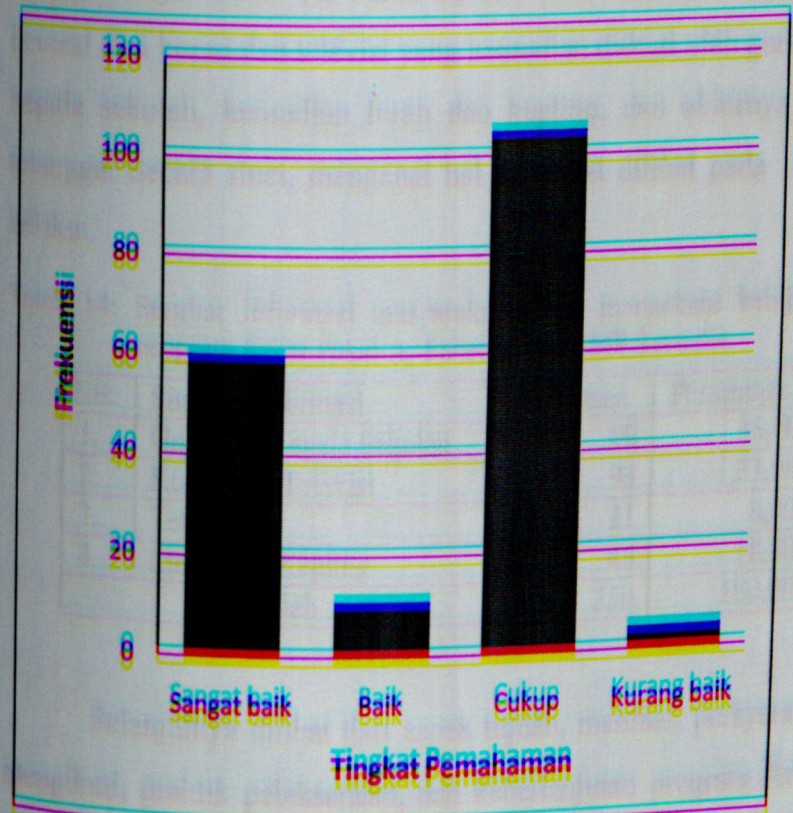


Diagram 5: Tingkat pemahaman masyarakat tentang Dana BOS

2.1.3. Akses Masyarakat Miskin Kota Medan terhadap Informasi Kebijakan program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka

Melalui penelitian ini diketahui bahwa sumber informasi utama masyarakat miskin kota Medan dalam mengakses kebijakan program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka umumnya berasal dari koran dan televisi yang kemudian diikuti oleh guru dan kepala sekolah, kemudian lurah dan kepling, dan akhirnya dari tetangga. Secara rinci, mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14: Sumber informasi masyarakat dalam mengakses kebijakan program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka

No.	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase
1.	Guru dan Kepala Sekolah	90	36,00
2.	Koran dan Televisi	93	37,20
3.	Tetangga	21	8,40
4.	Lurah dan Kepling	46	18,40
	Jumlah	250	100,00

Selanjutnya dilihat dari aspek tujuan, manfaat, persyaratan mengikuti, praktik pelaksanaan, dan keberlanjutan program Kejar Paket A, B, dan SMP Terbuka, tingkat pengetahuan masyarakat miskin Kota Medan tentang program kejar paket A, Paket B, dan SMP Terbuka secara umum terbagi kepada dua kelompok besar, yaitu sebanyak 38,4% dapat dikategorikan kepada baik dan 32% kurang baik. Sedangkan selebihnya, 18% berada pada kategori

cukup baik dan 8,4% sangat baik. Secara rinci mengenai hal ini dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15: Tingkat pemahaman masyarakat miskin tentang program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka

NO	Tingkat Pemahaman	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	29	11,60
2	Baik	96	38,40
3	Cukup	45	18,00
4	Kepting / Petugas Kelurahan	80	32,00
Jumlah		250	100,00

Dalam bentuk diagram, tingkat pengetahuan masyarakat tersebut bisa divisualisasikan sebagai berikut:

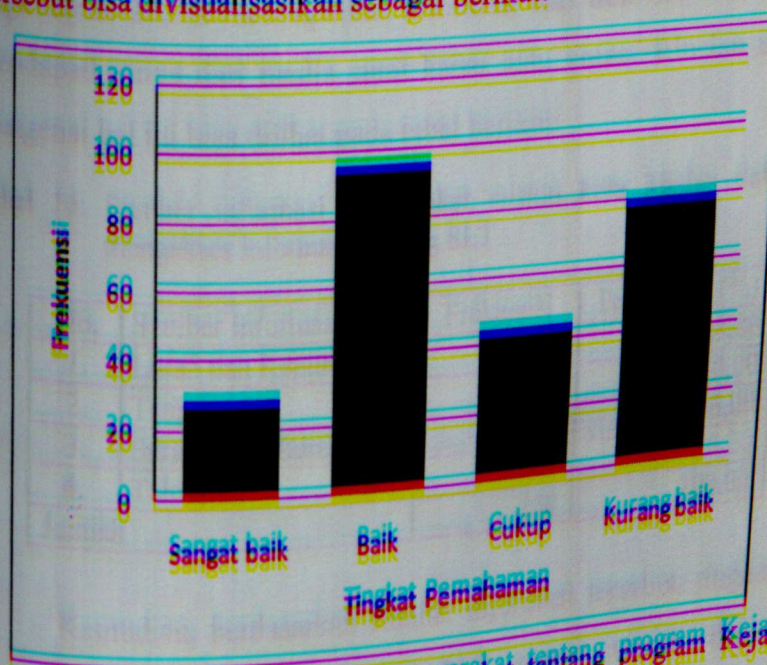


Diagram 6 : Tingkat pemahaman masyarakat tentang program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka

2.2: Akses informasi dan tingkat pemahaman masyarakat miskin kota Medan terhadap dana Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Dalam hal mengakses informasi tentang program bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin, dalam hal ini Subsidi Langsung Tunai (SLT), masyarakat mendapatkan informasi dari empat sumber, yaitu lurah atau kepala lingkungan, tetangga, surat kabar, dan televisi. Dari keempat sumber informasi tersebut, berdasarkan isian angket diketahui bahwa mayoritas atau 30% responden mengaku mendapatkan informasi tentang SLT dari tetangganya, 28,8% mendapatkan informasi dari lurah atau kepala lingkungan, 25,2% mendapatkan informasi dari televisi, dan 16% mendapatkannya dari media surat kabar atau koran. Rincian data mengenai hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16: Sumber informasi masyarakat miskin kota Medan dalam mengakses informasi tentang SLT

No.	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lurah dan Kepling	72	28,80
2.	Tetangga	75	30,00
3.	Surat Kabar/koran	40	16,00
4.	Televisi	63	25,20
Jumlah		250	100,00

Kemudian, berdasarkan sumber informasi tersebut, tingkat pemahaman masyarakat terhadap SLT secara umum dapat dikategorikan sangat baik. Indikator kategori ini didasarkan pada

pemahaman masyarakat mengenai SLT, persyaratan untuk memperoleh atau mendapatkannya, besaran biaya yang diperoleh, dan tempat penyaluran atau pengambilan dana SLT. Dalam bentuk diagram, pemahaman tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:

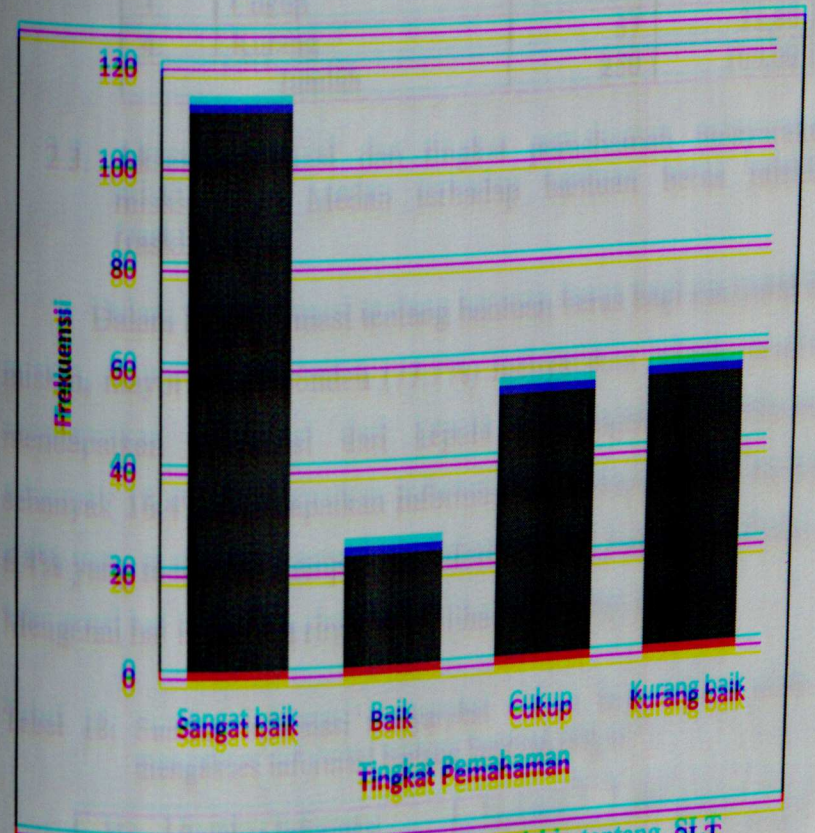


Diagram 7: Tingkat pemahaman masyarakat miskin tentang SLT

Kemudian dalam bentuk tabel, tingkat pemahaman masyarakat tentang informasi SLT tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 17: Tingkat pemahaman masyarakat miskin kota Medan tentang informasi SLT

No:	Tingkat Pemahaman	Frekuensi	Persentase
1:	Sangat Baik	113	45,20
2:	Baik	25	10,00
3:	Cukup	55	22,00
4:	Kurang	57	22,80
Jumlah		250	100,00

2.3: Akses informasi dan tingkat pemahaman masyarakat miskin kota Medan terhadap bantuan beras miskin (raskin)

Dalam hal informasi tentang bantuan beras bagi masyarakat miskin, mayoritas responden (77,2%) menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi dari kepala lingkungan. Selebihnya, sebanyak 16,4% mendapatkan informasi dari tetangga, dan hanya 6,4% yang mengaku memperoleh informasi dari radio dan televisi. Mengenai hal ini secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18: Sumber informasi masyarakat miskin kota Medan dalam mengakses informasi tentang bantuan raskin

No:	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase (%)
1:	Kepala lingkungan	193	77,20
2:	Tetangga	41	16,40
3:	Radio dan televisi	16	6,00
Jumlah		250	100,00

Kemudian berdasarkan persyaratan mendapatkan, besaran bantuan, dan tempat-tempat penyaluran bantuan raskin, maka tingkat

pengetahuan masyarakat mengenai raskin dapat divisualisasikan dalam diagram berikut:

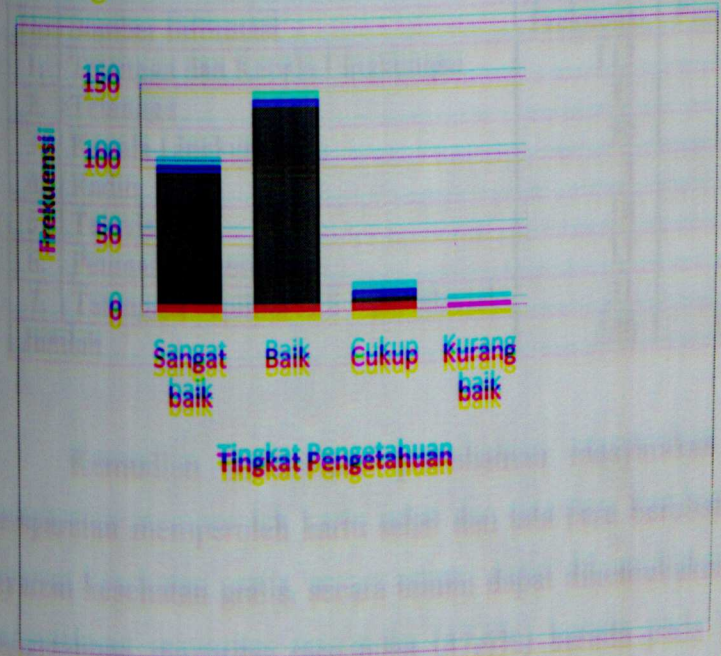


Diagram 8: Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bantuan raskin

2.4. Akses informasi dan tingkat pemahaman masyarakat miskin kota Medan terhadap layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin

Berkaitan dengan layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, responden mendapatkan informasi mengenai hal ini dari berbagai sumber, yaitu tetangga, kepala lingkungan, radio, televisi, dan petugas puskesmas. Dari seluruh sumber tersebut, tetangga dan kepala lingkungan menempati posisi pertama sebagai sumber informasi yang paling banyak diakses masyarakat. Mengenai hal ini, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19: Sumber informasi tentang layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase
1.	Tetangga dan Kepala Lingkungan	113	45,20
2.	Tetangga	37	14,80
3.	Kepala Lingkungan	29	6,00
4.	Radio	7	2,80
5.	Televisi	16	6,40
6.	Petugas Puskesmas	17	6,80
7.	Tetangga, kepling, radio dan televisi	31	12,40
	Jumlah	250	100,00

Kemudian berdasarkan pemahaman masyarakat tentang persyaratan memperoleh kartu sehat dan tata cara berobat dengan layanan kesehatan gratis, secara umum dapat dikemukakan bahwa pengetahuan mayoritas responden (47,6%) berada pada kategori baik. Mengenai hal ini divisualisasikan melalui diagram berikut:

Tabel 19: Standar Bermanfaat tentang layanan kesehatan gratis bagi Masyarakat miskin

No	Berkas	Indikator
1	113	Tersedia dan dapat diakses
2	37	Tersedia
3	10	Kepala keluarga
4	7	Hasil
5	10	Tersedia
6	14	Pemasangan
7	31	Tersedia dan dapat diakses
Jumlah	200	

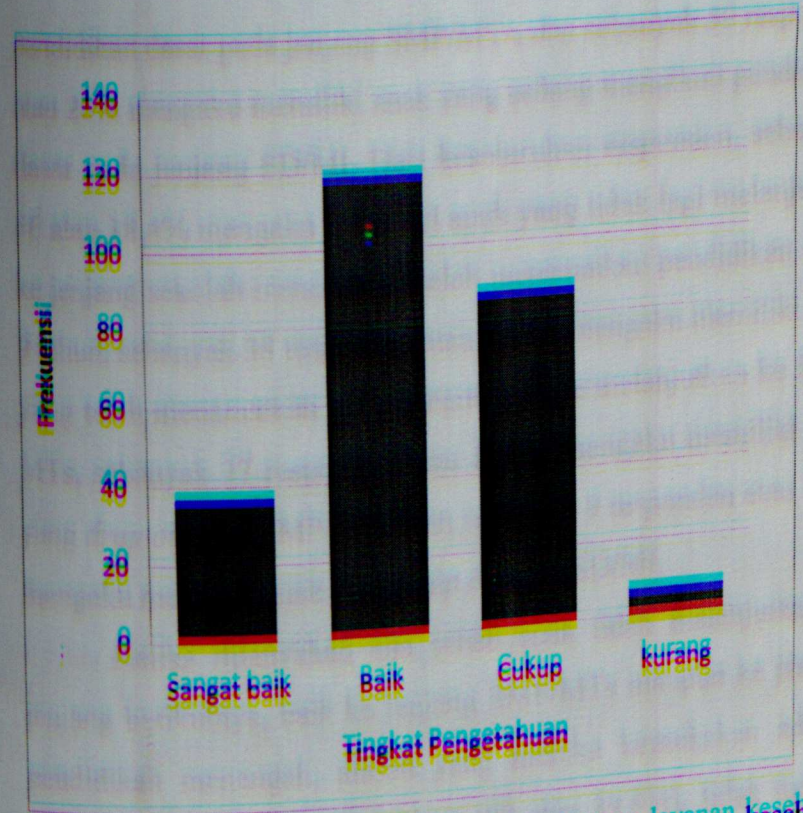


Diagram 9: Tingkat pengetahuan masyarakat tentang layanan kesehatan gratis

3. Pengalaman Praktis Masyarakat Muslim Miskin Kota Dalam Menyekolahkan Anak pada Jenjang Pendidikan Dasar

Seluruh responden memiliki anak yang sedang dan telah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Dari 250 responden, sebanyak 143 atau 57% memiliki anak yang sedang dan telah mengikuti pendidikan dasar pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, sebanyak 57 responden atau 22,8% memiliki anak yang sedang mengikuti

pendidikan dasar pada jenjang SMP/MTs, dan sebanyak 50 responden atau 20% mengaku memiliki anak yang sedang mengikuti pendidikan dasar pada jenjang SD/MI. Dari keseluruhan responden, sebanyak 46 atau 18,4% mengaku memiliki anak yang tidak lagi melanjutkan ke jenjang sekolah menengah setelah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun, sebanyak 38 responden atau 15,2% mengaku memiliki anak yang telah menamatkan SD/MI namun tidak melanjutkan ke SMP/MTs, sebanyak 27 responden atau 10,8% mengaku memiliki anak yang *drop out* dari SMP/MTs, dan sebanyak 9 responden atau 3,6% mengaku memiliki anak yang *drop out* dari SD/MI.

Ketika ditanyakan apa sebab anak tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik ke jenjang SMP/MTs maupun ke jenjang pendidikan menengah, alasan yang mereka kemukakan adalah: dikarenakan tidak memiliki biaya (99 atau 39,6%), tidak mampu menyiapkan dan melengkapi keperluan anak (87 atau 34,8%), tidak mampu membiayai transport, uang saku, dan keperluan sekolah anak (56 atau 22,4%), dan anak sudah tidak mau lagi sekolah (8 atau 3,2%).

Berbeda dengan itu, ketika ditanyakan mengapa anak mereka *drop out* sebelum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun (baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs), diperoleh jawaban yang variatif: tidak mampu membayar uang pembangunan (79 atau 31,6%), tidak mampu membayar uang partisipasi orangtua yang ditetapkan Komite Sekolah/madrasah (98 atau 39,2%), ketika akan

ujian, tidak mampu melunasi SPP dan biaya ujian (16 atau 6,4%); anak ikut bekerja membantu ekonomi rumah tangga (13 atau 5,2%); anak sudah tidak mau lagi sekolah karena tidak memiliki buku pelajaran dan perlengkapan untuk sekolah (44 atau 17,6%)

Dalam hal mendaftarkan anak ke pendidikan dasar, 34,8% responden mengaku bahwa mereka tidak menemukan kesulitan apapun ketika mendaftarkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan dasar, baik pada SD/SMP maupun MI/MTs. Sedangkan selebihnya, sebanyak 32% mengaku menemui kesulitan, 31,2% mengaku sangat sulit, dan sebanyak 2% mengatakan cukup sulit. Secara rinci tentang hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19: Pengalaman mendaftarkan anak masuk pendidikan dasar

No.	Pengalaman	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sulit	78	31,20
2.	Sulit	80	32,00
3.	Cukup sulit	5	2,00
4.	Mudah	87	34,80
	Jumlah	250	100,00

Dari isian angket semi terbuka dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kesulitan yang dihadapi responden bervariasi, dari mulai sulitnya memenuhi persyaratan atau perlengkapan administrasi, seperti harus adanya akte kelahiran dan surat lulus Taman Kanak-Kanak, kesulitan mengisi formulir karena kurang mengerti, dan kesulitan dalam memenuhi atau membayar uang pangkal.

Dalam kaitannya dengan biaya pendaftaran, berdasarkan angket yang disebar diketahui bahwa besaran biaya yang harus dibayarkan orangtua ke sekolah atau madrasah berada antara kisaran Rp: 10.000 sampai dengan Rp: 1.000.000,-. Mengenai hal ini hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:

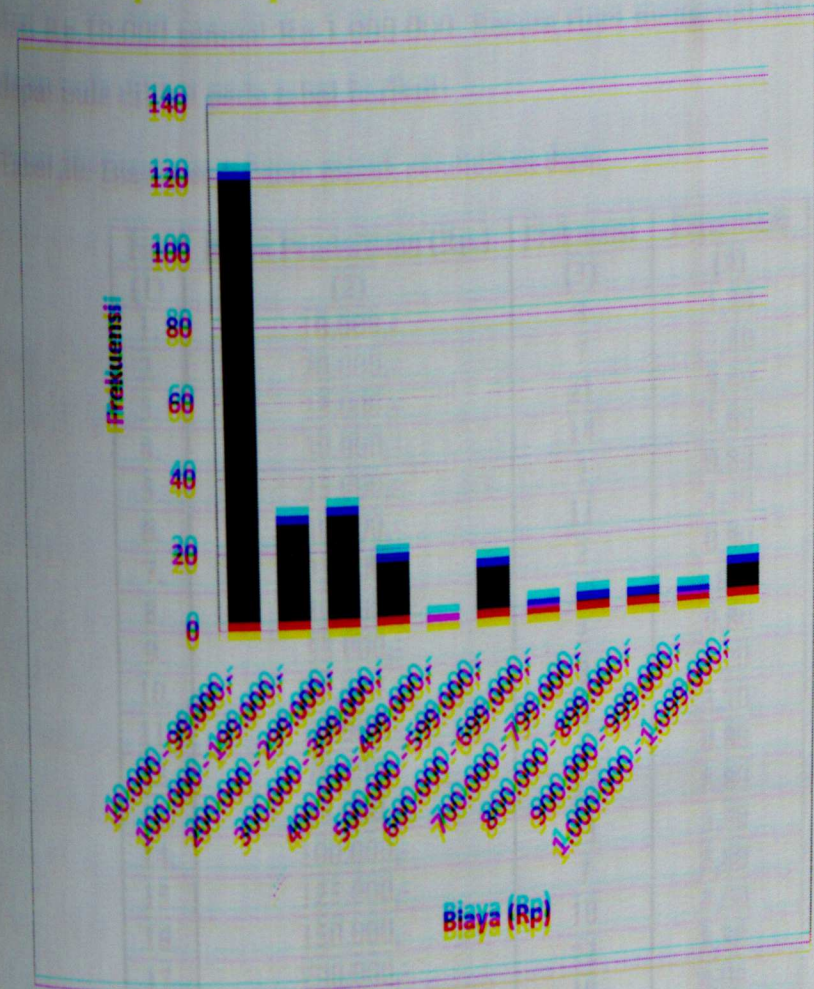


Diagram 10: Biaya pendaftaran masuk pendidikan dasar

Meskipun diagram di atas memperlihatkan bahwa mayoritas responden mengeluarkan uang rata-rata antara Rp.10.000 s.d Rp.99.000 untuk mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan dasar, namun melalui diagram tersebut juga bisa dilihat bahwa jumlah uang yang dikeluarkan responden sangat bervariasi, yakni dari Rp.10.000 sampai Rp.1.000.000. Secara rinci mengenai hal ini dapat pula dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20: Biaya pendaftaran masuk pendidikan dasar

No	Biaya Pendaftaran (Rp.)	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10.000,-	3	1,20
2.	20.000,-	7	2,80
3.	25.000,-	21	8,40
4.	30.000,-	14	5,60
5.	35.000,-	2	0,80
6.	40.000,-	11	4,40
7.	45.000,-	2	0,80
8.	50.000,-	20	8,00
9.	55.000,-	2	0,80
10.	60.000,-	8	3,20
11.	65.000,-	8	3,20
12.	70.000,-	2	0,80
13.	75.000,-	22	8,80
14.	100.000,-	13	5,20
15.	125.000,-	7	2,80
16.	150.000,-	10	4,00
17.	200.000,-	22	8,80
18.	250.000,-	10	4,00
19.	300.000,-	12	4,80
20.	350.000,-	7	2,80

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	400.000,-	2	0,80
22.	500.000,-	16	6,40
23.	600.000,-	4	1,60
24.	700.000,-	5	2,00
25.	800.000,-	5	2,00
26.	900.000,-	4	1,60
27.	1.000.000,-	11	4,40
Jumlah		250	100,00

Selanjutnya, berdasarkan data angket diketahui pula bahwa selain biaya yang harus disetorkan ke sekolah, responden juga harus mengeluarkan biaya lain untuk keperluan anak ketika pertama kali mereka masuk ke pendidikan dasar. Pengeluaran tersebut umumnya adalah untuk membeli pakaian seragam, pakaian olahraga, pakaian pramuka, sepatu, buku (buku tulis, halus-kasar, buku gambar), alat tulis (pensil/pulpen, penggaris, penghapus), dan buku pelajaran. Untuk ini, rata-rata responden harus 'mengocek' kantongnya antara Rp.100.000 sampai Rp.1.000.000. Diagram berikut memperlihatkan besaran biaya yang rata-rata dikeluarkan atau dibelanjakan orangtua pada tahun pertama ketika anaknya masuk ke pendidikan dasar:

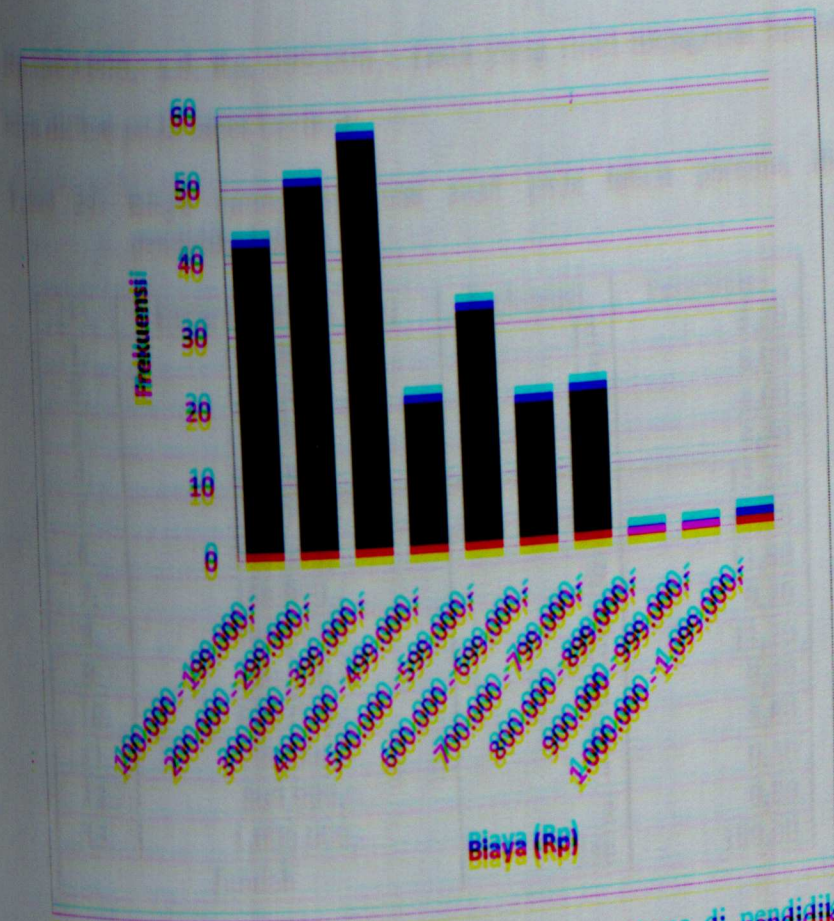


Diagram 11: Biaya keperluan anak pada tahun pertama di pendidikan dasar

Berbeda dengan biaya yang dikeluarkan orangtua untuk mendaftarkan anak pada pendidikan dasar, diagram di atas memperlihatkan bahwa besaran dana yang dibelanjakan orangtua ketika tahun pertama anaknya masuk ke pendidikan dasar berkisar antara Rp: 100.000,- sampai Rp: 1.099.000,-. Diagram di atas memperlihatkan bahwa umumnya orangtua mengeluarkan uang di atas Rp: 100.000,- dengan kecenderungan umum berkisar antara

Rp. 300.000,- s.d. Rp. 399.000,-: Data yang rinci mengenai hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21: Biaya untuk keperluan anak pada tahun pertama di pendidikan dasar

No.	Besarnya biaya (Rp)	Frekuensi	Persentase
1.	100.000,-	13	5,20
2.	125.000,-	13	6,00
3.	150.000,-	13	6,00
4.	200.000,-	13	5,20
5.	250.000,-	38	15,20
6.	300.000,-	28	11,20
7.	350.000,-	29	11,60
8.	400.000,-	23	9,20
9.	500.000,-	33	13,20
10.	600.000,-	23	9,20
11.	700.000,-	22	8,80
12.	800.000,-	1	0,40
13.	1.000.000,-	2	0,80
Jumlah		250	100,00

Berdasarkan pengakuan mayoritas responden, selama mengikuti pendidikan dasar, umumnya anak-anak mereka tidak pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif atau kurang menyenangkan dari sekolah. Dari keseluruhan responden, hanya 9,2% yang mengaku anak mereka pernah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari sekolah. Berdasarkan pengakuan mereka, sebagaimana tertera dalam jawaban angket, diketahui bahwa bentuk-bentuk perlakuan tersebut umumnya adalah diperintahkan pulang

ke rumah karena belum membayar uang SPP, tidak diikutkan beberapa kali dalam pembelajaran karena tidak memiliki buku pelajaran, dan diancam tidak boleh mengikuti ujian semester bila tidak segera melunasi tunggakan dana sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP).

4. Harapan dan Saran Masyarakat terhadap Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Institusi Persekolahan, dan Masyarakat dalam Memperluas Akses terhadap Pendidikan Dasar

Penelitian ini berhasil menjangkau data berkenaan dengan harapan masyarakat miskin kota Medan kepada pemerintah (pusat dan daerah), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, institusi persekolahan, dan masyarakat untuk memperluas akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar. Secara rinci, harapan-harapan dan saran-saran yang diajukan masyarakat untuk memperluas akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar dapat disajikan berikut ini.

(1) Kepada Pemerintah Pusat

Secara umum, harapan dan saran masyarakat kepada pemerintah pusat dalam rangka memperluas akses anak-anak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar meliputi lima hal pokok, yaitu: (1) anggaran biaya pendidikan, (2) pemberian beasiswa, (3) penyediaan buku

teks atau pelajaran, (4) pengawasan penyaluran dana bantuan pendidikan, dan (4) mensurvei secara langsung kondisi warga kurang mampu. Secara rinci, seluruh harapan dan saran masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan atau memperbesar anggaran pendidikan untuk membantu pembiayaan pendidikan semua anak-anak yang berasal dari keluarga miskin agar mereka tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikannya.
2. Memprioritaskan pemberian bea siswa studi kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu.
3. Meningkatkan jumlah dana BOS, khususnya kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Memberikan buku pelajaran secara gratis kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, khususnya bagi anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
5. Bantuan pendidikan untuk warga miskin hendaknya disalurkan secara langsung, tanpa melalui perantara sekolah atau kantor kelurahan.
6. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran bantuan pendidikan dasar untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
7. Memberikan kredit pendidikan dengan syarat yang mudah dan ringan untuk membiayai pendidikan anak yang berasal dari

keluarga miskin, khususnya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan mereka

8. Pemerintah hendaknya mensurvei secara langsung kondisi warga kurang mampu sebagai data awal untuk memberikan bantuan biaya pendidikan
9. Anggaran pendidikan bagi keluarga miskin hendaknya menjadi prioritas utama dalam pembiayaan pendidikan dasar

(2) Kepada Pemerintah Daerah

Kepada pemerintah daerah (Pemda) harapan dan saran masyarakat berkenaan dengan enam hal pokok, yaitu: (1) pendataan yang lebih teliti tentang jumlah penduduk miskin, (2) penyelenggaraan pendidikan yang benar-benar gratis, (3) sosialisasi informasi yang menyeluruh, (4) pendirian posko informasi bantuan bagi keluarga miskin, (5) mengawasi pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan, (6) pendataan keluarga miskin dan mengumumkan secara terbuka, dan (7) menaikkan insentif bagi guru bantu dan honorer. Secara lebih rinci, seluruh harapan dan saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan yang lebih teliti tentang jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah, dari mulai dusun, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/ kota
2. Mengupayakan terselenggaranya pendidikan yang benar-benar gratis bagi seluruh anak warga miskin

- 3: Memperluas sosialisasi dan penyebaran informasi tentang program-program pemberian bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin
- 4: Menyediakan posko atau pusat informasi di desa/kelurahan untuk menyebarkan program-program bantuan pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga miskin
- 5: Membantu biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang berasal dari warga miskin
- 6: Meninjau kembali data-data keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mengumumkannya secara terbuka
- 7: Selalu membantu dan mengawasi berbagai kegiatan di sekolah untuk menghindari agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian bantuan pendidikan yang dapat merugikan masyarakat
- 8: Memberi bantuan kepada keluarga miskin secara merata terutama berkaitan dengan wajib pendidikan dasar 9 tahun
- 9: Jangan menunda-nunda pengeluaran bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk keluarga miskin
- 10: Mengupayakan penghapusan segala bentuk biaya iuran atau pungutan yang dibebankan oleh sekolah kepada warga yang kurang mampu

11. Sarana dan fasilitas untuk pendidikan perlu diperhatikan dan ditingkatkan
12. Menambah jumlah guru agar sekolah benar-benar mampu melayani dan mendidik semua anak usia sekolah
13. Gaji dan insentif guru, khususnya bagi guru bantu dan honorer, hendaknya lebih ditingkatkan agar lebih layak lagi sehingga mereka benar-benar dapat terkonsentrasi pada pelaksanaan tugasnya mendidik anak-anak
14. Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu

(3) *Kepada Departemen Pendidikan*

Melalui angket terbuka, diketahui bahwa ada tujuh item yang menjadi harapan dan saran masyarakat miskin kepada Departemen Pendidikan Nasional berkaitan dengan perluasan akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar. Ketujuh harapan dan saran tersebut adalah:

1. Mengatur pendistribusian buku pelajaran, terutama berkaitan dengan biaya penjualan buku pelajaran agar jangan terlalu mahal sehingga tidak bisa dijangkau anak-anak warga miskin
2. Menjamin agar semua dana bantuan yang dipersiapkan pemerintah bagi siswa kurang mampu dapat diberikan secara tepat sasaran

3. Menata kembali alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan dasar agar pendidikan dasar dapat dijangkau oleh semua warga negara, khususnya warga miskin
4. PBM pada sekolah hendaknya ditingkatkan mutunya agar setiap anak warga miskin juga bisa benar-benar mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas
5. Siswa yang *drop out* dan putus sekolah hendaknya mendapatkan perhatian dengan pemberian biaya atau penyelenggaraan pendidikan oleh Diknas yang betul-betul gratis sehingga mereka bisa bersekolah kembali
6. Diknas hendaknya jangan membuat peraturan yang dapat mempersulit atau menghambat siswa dari keluarga miskin untuk tetap bisa bersekolah
7. Wajar Dikdas 9 tahun untuk warga miskin hendaknya menjadi perhatian utama dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan

(4) Kepada Departemen Agama

Ada lima hal pokok yang menjadi harapan dan saran masyarakat kepada Departemen Agama dalam kaitannya dengan memperluas akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar. Kelima harapan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Departemen Agama hendaknya benar-benar mendukung pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun

2. Mengupayakan pemberian bantuan beasiswa, alat, dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang berasal dari warga miskin
3. Melakukan kerja sama dengan Badan Amil Zakat dan organisasi-organisasi Islam untuk membantu masyarakat Muslim yang kurang mampu sehingga semua anak mereka tetap dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
4. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat Muslim, terutama berkaitan dengan kewajiban membantu saudaranya yang *dhu'afa'* dan kurang mampu agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah
5. Departemen Agama hendaknya menambah sebanyak mungkin lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat anak-anak didik Muslim mempelajari ajaran agamanya secara gratis

(3) Lembaga Pendidikan Sekolah dan Madrasah

Kepada lembaga persekolahan dan madrasah, masyarakat berharap dan menyarankan empat hal berikut:

1. Sekolah dan madrasah hendaknya benar-benar berupaya untuk membantu para siswa miskin dalam mendapatkan bantuan biaya atau beasiswa pendidikan agar mereka tetap bisa bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya

2. Sekolah dan madrasah hendaknya segera memberitahukan kepada orangtua bila anak mereka tidak hadir ke sekolah/madrasah tanpa pemberitahuan resmi dari orangtua
3. Sekolah dan madrasah hendaknya tidak membeda-bedakan perlakuan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan siswa yang berasal dari keluarga kaya dan berkecukupan dalam mendidik mereka di sekolah/madrasah
4. Memberikan keringanan bagi siswa yang tidak mampu membayar SPP, uang buku, atau uang ujian agar mereka tetap bisa bersekolah dan menamatkan pendidikannya

(6) Kepada Masyarakat

Harapan dan saran masyarakat miskin terhadap masyarakat secara umum berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan moral untuk saling membantu sesama saudara mereka yang kurang mampu agar anak-anaknya tetap dapat bersekolah. Secara rinci, harapan dan saran tersebut adalah:

1. Masyarakat, khususnya kaum Muslimin, hendaknya senantiasa memelihara *ukhuwah* dan hubungan yang harmonis antara sesama Muslim
2. Masyarakat, khususnya orang-orang kaya Muslim, hendaknya saling membantu dalam membuka akses anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bisa bersekolah

3. Masyarakat, khususnya orang-orang kaya, hendaknya saling membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar
4. Kepada setiap muslim disarankan agar memperbanyak infaq dan sedekah untuk membantu saudaranya yang kurang mampu
5. Masyarakat muslim hendaknya senantiasa peduli terhadap pergaulan dan permasalahan yang dihadapi anak-anak
6. Setiap warga masyarakat yang kaya hendaknya bersedia menjadi Bapak angkat atau bapak asuh bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dalam hal menjamin akses mereka terhadap pendidikan dasar dan lanjutan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berkenaan dengan persepsi terhadap pendidikan, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Muslim miskin kota Medan memiliki persepsi yang baik terhadap pendidikan. Bagi mereka, pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang akan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap mental yang berguna bagi kehidupan, khususnya di masa depan. Kemudian melalui penelitian ini juga ditemukan bahwa persepsi masyarakat miskin tentang manfaat pendidikan dasar dapat dinyatakan sangat positif. Sebagaimana dideskripsikan di atas, bagi mereka, pendidikan dasar itu bermanfaat dalam mempersiapkan

anak agar menjadi manusia yang berguna bagi orangtua, agama, nusa, dan bangsa, disamping untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna ketika akan memasuki dunia kerja. Berdasarkan hal ini, dapat dikemukakan bahwa, pemahaman masyarakat tentang pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai salah satu faktor yang turut menghambat akses mereka terhadap pendidikan dasar.

Dilihat dari tujuan, masyarakat miskin umumnya berharap agar anak-anak mereka menjadi manusia yang cerdas setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Hemat peneliti, masyarakat sepertinya memahami bahwa kecerdasan merupakan variabel kunci untuk berhasil dalam kehidupan, baik dalam menghadapi masalah, merespon atau menyikapi masalah, maupun mencari solusi atau jalan keluar dari masalah. Karena itulah, mayoritas responden penelitian ini memandang pendidikan sebagai sangat penting bagi anak-anak mereka. Itu jugalah sebabnya, hemat peneliti, karena pentingnya pendidikan, maka responden tidak membedakan antara lembaga pendidikan keagamaan (MI/MTs) dan pendidikan umum (SD/SLTP) dalam menyekolahkan anaknya. Bagi mereka, baik sekolah di SD dan SLTP maupun MI dan MTs sama saja, yakni memberikan bekal pendidikan dasar kepada anak agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang diperlukan dalam

kehidupannya kelak di masa depan. Dari sisi ini, persepsi masyarakat tentang tujuan dan lembaga pendidikan, tidak dapat dikemukakan sebagai faktor yang menghambat akses mereka terhadap pendidikan dasar.

Suatu hal yang juga sangat perlu digarisbawahi dari temuan penelitian ini adalah bahwa persepsi responden tentang urgensi pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Melalui penelitian ini diketahui bahwa masyarakat miskin kota Medan memandang bahwa, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama memerlukan pendidikan. Bahkan menurut mereka, pendidikan itu tidak hanya sebatas pendidikan dasar, tetapi sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Suatu hal yang positif adalah, meskipun dalam kondisi miskin, mayoritas masyarakat tetap berencana semaksimal mungkin akan menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekali lagi, dari sisi ini, persepsi masyarakat tentang urgensi pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan tidak dapat dikemukakan sebagai faktor yang menghambat akses mereka terhadap pendidikan dasar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa, meskipun pemerintah telah mengundang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan mengalokasikan dana yang relatif besar untuk mengimplementasikannya, baik untuk penyelenggaraan pendidikan dasar maupun program-program bantuan kepada keluarga miskin,

dalam kenyataannya, masyarakat miskin masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam mengakses pendidikan dasar tersebut. Kendala pertama masih berada di seputar masalah klasik, yakni *cost* atau pembiayaan. Sebagaimana ditemukan, ketika mendaftarkan anaknya ke pendidikan dasar, orangtua harus mengeluarkan biaya yang besarnya antara Rp. 100.000 sampai Rp. 1.000.000,-. Jumlah ini belum termasuk biaya yang harus dibelanjakan orangtua untuk melengkapi berbagai keperluan anak ketika pertama sekali mereka masuk sekolah. Tentu saja, biaya sebesar itu sangat sulit dipenuhi orangtua bila ditilik dari kondisi objektif mereka sebagai masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan isian angket diketahui bahwa mayoritas penghasilan responden per bulan berkisar antara Rp. 360.000,- sampai dengan Rp. 550.000,-. Mengenai hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 13. Penghasilan rata-rata responden

Dari data yang disajikan tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki penghasilan per bulan yang berkisar antara Rp. 360.000,- sampai dengan Rp. 550.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang berada di sekitar lokasi penelitian masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya informasi tentang layanan pendidikan, kurangnya dukungan dari pemerintah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

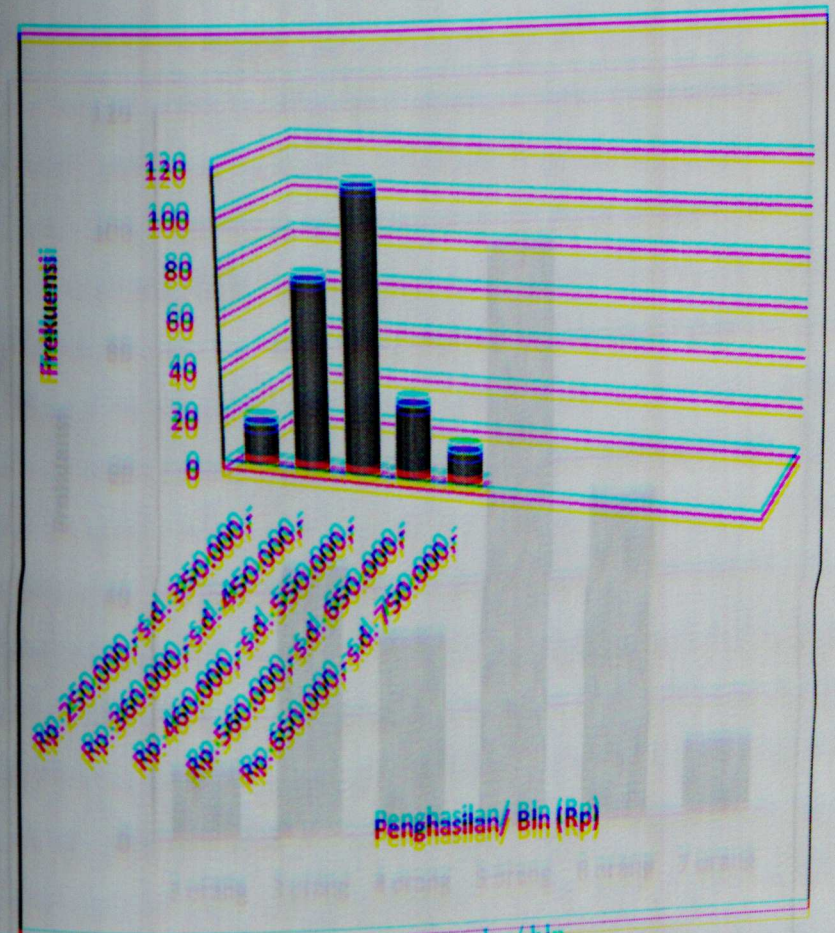


Diagram 12: Penghasilan rata-rata responden/ bin

Dari sisi lain, kesulitan responden untuk mempersiapkan biaya ketika akan mendaftarkan ulang dan belanja untuk melengkapi keperluan anak ketika tahun pertama masuk ke pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) bisa dimaklumi bila dilihat dari jumlah anak yang menjadi tanggungan mereka. Dalam konteks ini, rata-rata sebuah keluarga memiliki anak 5 sampai 6 orang. Mengenai hal ini bisa divisualisasikan pada diagram berikut:

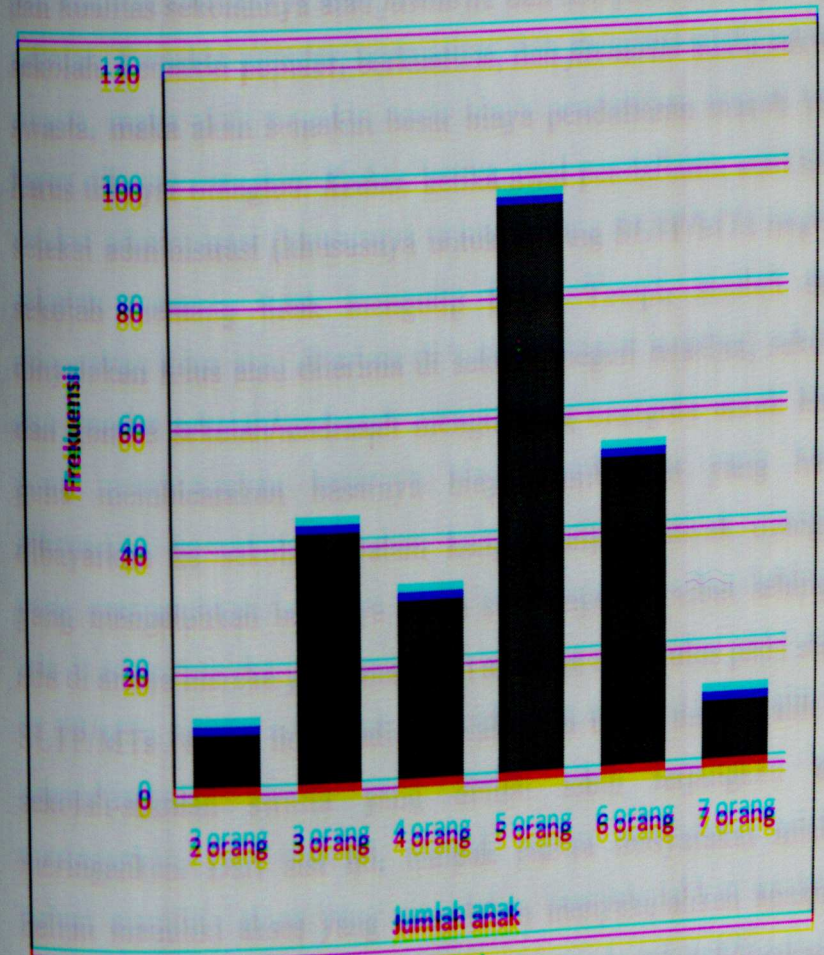


Diagram 13: Rata-rata jumlah anak/ keluarga

Hemat peneliti, besarnya biaya yang harus dikeluarkan tersebut dikarenakan dua hal: *Pertama*, tidak semua masyarakat miskin yang menyekolahkan anaknya ke SD/SLTP atau MI/MTs negeri. Dalam kenyataannya, antara satu sekolah swasta dengan sekolah swasta yang lain berbeda-beda dalam hal biaya pendafaran masuk pendidikan dasar, umumnya tergantung pada popularitas

dan kualitas sekolahnya atau *favourite* dan *non-favourite*-nya suatu sekolah. Semakin populer, berkualitas, dan *favourite* suatu sekolah swasta, maka akan semakin besar biaya pendaftaran masuk yang harus dibayar orangtua. *Kedua*, ketika awal pendaftaran atau masa seleksi administrasi (khususnya untuk jenjang SLTP/MTs negeri), sekolah memang tidak mengutip biaya. Tetapi, setelah anak dinyatakan lulus atau diterima di sekolah negeri tersebut, sekolah dan komite sekolah/madrasah mengundang orangtua untuk hadir guna membicarakan besarnya biaya sumbangan yang harus dibayarkan ke sekolah. Dalam kenyataannya, banyak orangtua yang mengeluhkan besarnya biaya sumbangan tersebut sehingga ada di antara mereka yang meskipun anaknya telah lulus pada suatu SLTP/MTs Negeri tidak jadi mendaftarkan ulang dan beralih ke sekolah-sekolah swasta yang dinilai lebih terjangkau dan meringankan. Dari sisi ini, tampak bahwa masyarakat miskin belum memiliki akses yang luas dalam menyekolahkan anaknya pada sekolah atau madrasah negeri, apalagi pada sekolah/madrasah *favourite* yang biasanya berkualitas.

Sebab, dalam kenyataannya, meskipun sebahagian orangtua telah berupaya menghindari dari besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk mendaftarkan ulang anaknya yang telah lulus di sekolah/madrasah negeri, ketika mendaftarkan anaknya di sekolah swasta pun, mereka juga harus 'mengocek' kantongnya untuk

membayar biaya uang pangkal atau pembangunan. Selain itu, semua orangtua, baik yang anaknya bersekolah di pendidikan dasar negeri maupun swasta, mereka tetap harus menyediakan dana dalam jumlah yang besar, yakni antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,- untuk membeli berbagai keperluan sekolah anaknya dari mulai pakaian seragam, sepatu, buku tulis, buku pelajaran, tas, alat tulis dan perlengkapan lainnya. Mencermati hal ini, sepertinya patut diduga kuat bahwa beratnya beban biaya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses masyarakat miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar. Temuan penelitian ini memperkuat statemen yang menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal telah mempengaruhi hilangnya kesempatan bagi anak keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan dasar. Rendahnya pendapatan masyarakat miskin (internal) dan adanya kecenderungan diferensiasi sekolah/madrasah ke dalam sekolah populer atau *favourite* dan *non-favourite* (eksternal) sehingga sulit dijangkau keluarga miskin, disadari atau tidak disadari, telah menjadi faktor penghambat masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan dasar.¹

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan yang diarahkan pada upaya memberhasilkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi semua warga negara, seperti

¹ Untuk analisis perbandingan lihat http://www.ditperta1s.net/06/download/contoh_desainkurikulum_pgmi.pdf

pemberian dana BOS, pelaksanaan Kejar Paket A, Paket B, dan program SMP terbuka, namun penelitian ini menemukan bahwa akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar tetap saja belum sesuai dengan harapan. Dalam konteks dana BOS, sebagaimana ditemukan juga oleh Batubara,² pemberian dana tersebut memang terasa meringankan dan membantu bagi masyarakat miskin. Namun, dikarenakan besarnya biaya yang diperlukan orangtua untuk menyekolahkan anak dan memenuhi berbagai keperluan atau perlengkapan sekolahnya pada pendidikan dasar, maka jumlah dana BOS tersebut masih jauh dari mencukupi. Hal ini ditambah lagi oleh kebijakan pemerintah yang tidak membatasi pemberian dana BOS hanya untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

Kemudian, dalam hal Kejar Paket A, B, dan SMP Terbuka, meskipun mayoritas masyarakat memiliki akses informasi tentang hal itu, dari hasil pemeriksaan terhadap angket diketahui bahwa hanya 5,2% responden yang mengaku pernah menyertakan anaknya mengikuti program dimaksud. Dalam hal ini, mayoritas atau 89,2% menyatakan tidak memiliki anak yang bersekolah atau melanjutkan studi pada Kejar Paket A, B, dan SMP Terbuka. Selebihnya atau sebanyak 5,6% bahkan tidak beresedia menjawab. Hemat peneliti,

² Lihat Abdul Muhyi Batubara, *Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Lingkungan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Medan* (Medan: Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, 2006).

ekonomi masyarakat miskin. Hal ini belum lagi mempertimbangkan aspek penyimpangan/penyelewengan dalam implementasi atau pemberian bantuan.

Berkaitan dengan sumber informasi, penelitian ini menemukan bahwa, secara umum, akses masyarakat miskin kota Medan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dasar diperoleh melalui televisi dan kepala sekolah. Informasi tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun lebih banyak diakses oleh masyarakat miskin kota Medan melalui televisi. Informasi tentang dana BOS lebih banyak diakses masyarakat melalui kepala sekolah, sedangkan informasi tentang program Kejar Paker A dan B lebih banyak diakses masyarakat miskin melalui televisi. Itu artinya informasi tentang kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar yang mencakup Wajar Dikdas 9 tahun, dana BOS, dan program kejar Paket A dan Paket B, sebagian besar diperoleh melalui televisi dan kepala sekolah. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa televisi dan kepala sekolah merupakan media dan sumber utama bagi masyarakat miskin Kota Medan untuk mengakses informasi tentang kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dasar.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa baik dan positifnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin kota Medan terhadap informasi kebijakan-kebijakan atau program-program

pemerintah di bidang pendidikan dasar sangat bergantung pada media televisi dan informasi kepala sekolah. Dalam perspektif media pembelajaran, menurut Arsyad,³ belajar dengan menggunakan indera ganda (indera pandang-dengar), seperti belajar atau memperoleh informasi melalui televisi, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Masyarakat akan belajar lebih banyak dibanding jika materi atau informasi itu disajikan hanya dengan stimulus pandang atau dengar saja. Para ahli memiliki pandangan searah mengenai hal ini. Perbandingan pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang dan dengar sangat menonjol perbedaannya. Kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, 5% diperoleh melalui indera dengar, dan 5% dengan indera lainnya.⁴ Sementara pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar berkisar 13%, dan melalui indera lainnya berkisar 12%. Dari satu sisi, temuan penelitian ini mengimplikasikan agar di masa depan televisi didisain dengan baik dan difungsikan sebagai media utama dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah berkaitan dengan pendidikan dasar. Namun, dari sisi lain, melihat dinamika masyarakat dan perkembangan pengetahuan yang semakin cepat, sudah saatnya

³ Lihat Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 9.

⁴ Lihat Baugh sebagaimana dikutip dalam A. Achsin, *Media Pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar* (Ujung Pandang: IKIP Ujung Pandang, 1988).

dipikirkan media alternatif lain untuk mendukung televisi dalam mensosialisasikan kebijakan dan program-program pemerintah berkaitan dengan pendidikan dasar:

Berbeda dengan itu, dalam konteksnya dengan akses informasi terhadap kebijakan dan program pemerintah tentang bantuan kepada masyarakat miskin, penelitian ini menemukan bahwa akses itu lebih banyak diperoleh masyarakat dari tetangganya. Dari satu sisi, hal ini dimungkinkan karena tetangga merupakan orang terdekat, sehingga sering terjadi kontak antara sesama mereka. Kemudian, dari sisi lain, hal ini juga dimungkinkan karena kesamaan kondisi dan perasaan psikologis mereka sesama warga miskin. Dalam keadaan demikian, jika mereka mendapatkan informasi baru, misalnya tentang kebijakan pemerintah mengenai dana Saluran Langsung Tunai bagi keluarga miskin, maka segera saja informasi tersebut mereka sebar luaskan kepada jiran-tetangganya. Tentu saja, kenyataan ini menjadi salah satu kritik konstruktif dan bahan introspeksi bagi para petugas yang secara formal diberi amanah oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi berkenaan dengan berbagai kebijakan dan program bantuan bagi masyarakat miskin.

Dari hasil angket dan penelusuran data lanjutan diketahui bahwa sebanyak 34,8% masyarakat miskin yang menjadi responden penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak menemukan kesulitan dalam mendaftarkan anaknya ke pendidikan dasar. Namun, bila

ditotal secara keseluruhan, dari 250 responden sebanyak 63,2%, yang terbagi kepada 31,2% dan 32% menyatakan bahwa mereka sangat sulit dan sulit dalam mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan dasar. Kesulitan tersebut mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan administratif, seperti harus adanya akte kelahiran, ijazah TK/RA, kartu keluarga, dan item-item tertentu dalam formulir yang tidak dipahami sampai pada kesulitan dalam memenuhi pembayaran uang pangkal. Dari sisi ini peneliti melihat bahwa akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar tidak hanya dikarenakan persoalan klasik, yakni masalah dana, tetapi juga persoalan-persoalan administratif yang sebenarnya tidak harus menghalangi warga miskin untuk bersekolah. Akte kelahiran memang penting, ijazah TK/RA juga penting, kartu keluarga juga penting, mengisi formulir juga penting, tetapi jangan sampai semua itu menghalangi orang miskin untuk bersekolah. Dalam konteks ini, sepertinya instruksi walikota Medan untuk menggratiskan pengurusan KTP dan Kartu Keluarga serta kemudahan dan keringanan biaya dalam pengurusan akte kelahiran perlu untuk segera diteliti secara cermat implementasinya. Hal ini terutama mencermati bahwa rata-rata responden penelitian ini tidak memiliki kelengkapan surat dan dokumen tersebut. Dari sisi lain, hendaknya lembaga pendidikan persekolahan, apakah SD/MI atau SLTP/MTs, tidak menjadikan ijazah TK/RA menjadi persyaratan wajib bagi orangtua

dalam mendaftarkan anaknya pada pendidikan dasar. Sekali lagi, ijazah TK/RA memang penting, terutama untuk mempetakan kemampuan anak, tetapi jangan sampai hal itu menyebabkan warga miskin tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah.

Akhirnya, dapat dikemukakan bahwa, temuan penelitian ini hampir tidak jauh berbeda dengan penelitian lain yang mengambil topik dalam domain yang sama. Dalam laporannya tentang Reformasi Pendidikan Dasar di Indonesia, Ujiyati³ menyimpulkan bahwa pemerintah cenderung mengenyampingkan kebijakan-kebijakan bidang pendidikan dan sosial lainnya dibanding dengan kebijakan ekonomi. Disebabkan *political will* (kemauan politik) pemerintah yang rendah dan minimnya dana, berbagai kebijakan di bidang pendidikan cenderung bersifat pragmatis. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun mengandung pasal-pasal pengingkaran tanggung jawab negara menyelenggarakan pendidikan dasar dengan memberi porsi tanggung jawab yang sama kepada orangtua siswa. Ketika mendapatkan kesempatan menggunakan dana kompensasi BBM, pemerintah justru mengambil kebijakan populis yang kurang tepat. Sebab, dalam kenyataannya, selain kebijakan tersebut hanya

³ Lihat Tata Prapti Ujiyati, 'Reformasi Pendidikan Dasar di Indonesia' dalam Policy Assessment Juni 2005 The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Tersedia online di <http://www.theindonesianinstitute.com>. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2007.

memberikan subsidi pada sebahagian kecil kebutuhan siswa, dalam kenyataannya, kebijakan tersebut justru memberi subsidi kepada setiap siswa, tidak peduli kaya atau miskin. Akibatnya, kebijakan 'sekolah gratis' tidak mampu secara efektif meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan.

Temuan penelitian Diding Kurniady di kota Bandung juga melaporkan bahwa, meskipun implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah dinilai berhasil, namun beberapa kendala besar masih dihadapi, yakni rendahnya sikap mental, kurangnya sarana dan prasarana, lulusan kurang mampu bersaing, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap produktivitas pendidikan, budaya birokrasi, dan rendahnya produktivitas kerja.⁶

Dalam kurun waktu 2001-2003, besarnya dana kompensasi BBM yang disalurkan kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu atau masyarakat miskin sangat kecil sekali, yakni hanya sebesar Rp. 5,6 trilyun bagi 9, 77 juta siswa. Masih menjadi pertanyaan, apakah dana sebesar itu mampu untuk membayar SPP, buku dan alat tulis, uang pangkal sekolah, pakaian

⁶ Lihat Diding Kurniady, *Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar Dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Deskriptif di Dinas Kota Bandung*, penelitian Tesis. Tersedia online pada <http://sps.upi.edu/v3/?page=abstrak&option=tesis&action=view&id=629808>. Diakses pada tanggal 2 Nopember 2007.

dan perlengkapan sekolah, uang transport, kegiatan ekstra kurikuler, akomodasi, dan lain-lain.⁷

Secara eksplisit pemerintah sendiri dalam *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008* mengakui bahwa masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas pendidikan.⁸ Dengan mengutip data Balitbang Depdiknas, dinyatakan bahwa pada tahun 2006 jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 846,6 ribu anak dan jenjang SMP/MTs sebanyak 174,4 ribu anak. Pada tahun yang sama, sebanyak 322, 2 ribu tamatan SD/MI tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP/MTs. Masalah ekonomi (kaya-miskin) merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan partisipasi pendidikan di antara penduduk Indonesia. Tidak hanya untuk pendidikan formal, pendidikan nonformal pun belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat.⁹ Tampaknya, di negara tercinta ini, akses yang merata terhadap pendidikan dasar masih berada pada tataran konsep dan harapan (?)

⁷ Sabaruddin Siagian, 'Kompensasi BBM dan Pendidikan Gratis' online dalam http://www.frelis.org/archives/list_indonesia/03003/msg02476.html. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2007.

⁸ Lihat 'Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan' dalam *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008* (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2007), h. 1.

⁹ Lihat 'Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan Yang berkualitas dalam *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008*, *ibid.*, Bab 26, h. 2-4.

dan pembangunan sekolah yang terdapat, kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar sangat positif dan mendukung pendidikan dasar.

Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dasar, seperti: (a) tujuan memasukkan anak ke pendidikan dasar;

(b) manfaat pendidikan dasar; (c) alternatif memilih lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan Islam untuk sekolah anak mereka; (d) tanggung jawab terhadap pendidikan; (e) alternatif kepentingan untuk menyekolahkan anak atau mencari pekerjaan; dan (f) urgensi menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Akses masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan bantuan pengentasan kemiskinan umumnya juga baik.

Informasi tentang: (a) Wajar Dikdas 9 tahun; (b) dana Bantuan Operasional Sekolah; (c) program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka; (d) subsidi langsung tunai; beras raskin; dan layanan kesehatan gratis; umumnya diakses masyarakat Muslim miskin

yang terdistribusi dalam kecamatan-kota Medan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar sangat positif dan mendukung pendidikan dasar.

Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dasar, seperti: (a) tujuan memasukkan anak ke pendidikan dasar;

(b) manfaat pendidikan dasar; (c) alternatif memilih lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan Islam untuk sekolah anak mereka; (d) tanggung jawab terhadap pendidikan; (e) alternatif kepentingan untuk menyekolahkan anak atau mencari pekerjaan; dan (f) urgensi menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Akses masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan bantuan pengentasan kemiskinan umumnya juga baik.

Informasi tentang: (a) Wajar Dikdas 9 tahun; (b) dana Bantuan Operasional Sekolah; (c) program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka; (d) subsidi langsung tunai; beras raskin; dan layanan kesehatan gratis; umumnya diakses masyarakat Muslim miskin

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi masyarakat muslim miskin kota Medan terhadap pendidikan dasar sangat positif dan mendukung pendidikan dasar. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dasar, seperti: (a) tujuan memasukkan anak ke pendidikan dasar; (b) manfaat pendidikan dasar; (c) alternatif memilih lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan Islam untuk sekolah anak mereka; (d) tanggung jawab terhadap pendidikan; (e) alternatif kepentingan untuk menyekolahkan anak atau mencari pekerjaan; dan (f) urgensi menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Akses masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap kebijakan atau program-program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan bantuan pengentasan kemiskinan umumnya juga baik. Informasi tentang: (a) Wajar Dikdas 9 tahun; (b) dana Bantuan Operasional Sekolah; (c) program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka; (d) subsidi langsung tunai; beras raskin; dan layanan kesehatan gratis; umumnya diakses masyarakat Muslim miskin

kota Medan melalui televisi, kepala sekolah, dan tetangga. Berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat Muslim miskin kota Medan terhadap kebijakan atau program-program pemerintah tersebut sangat bervariasi mulai dari sangat baik, baik, dan cukup:

Berdasarkan pengalaman praktis masyarakat Muslim miskin kota Medan dalam menyekolahkan anak ke pendidikan dasar, penelitian ini menemukan bahwa secara umum mereka masih menemukan kesulitan dalam menyekolahkan anaknya pada pendidikan dasar. Bentuk-bentuk kesulitan yang dihadapi adalah: (a) kesulitan administratif, seperti kesulitan memenuhi persyaratan akte kelahiran dan kartu keluarga, (b) kesulitan dalam memahami item-item tertentu dalam formulir yang harus diisi ketika mendaftarkan anak ke pendidikan dasar, (c) kesulitan dalam memenuhi pembayaran uang pangkal ketika pertama sekali anak didaftarkan ke pendidikan dasar, dan (d) kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan menyangkut pendidikan anak pada pendidikan dasar.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan yang diarahkan pada upaya memberhasilkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi semua warga negara, seperti pemberian dana BOS, pelaksanaan program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan program SMP Terbuka, namun penelitian ini menemukan bahwa akses masyarakat miskin terhadap

pendidikan dasar tetap saja belum sesuai dengan harapan. Besarnya biaya partisipasi yang harus dibayarkan orangtua sebagaimana ditetapkan komite sekolah/ madrasah pada tahun pertama ketika anak masuk sekolah dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan orangtua dalam menyediakan dan melengkapi berbagai kebutuhan untuk sekolah anak, adalah persoalan terbesar yang menghambat akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dasar.

B. Saran-Saran

Karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan karena hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, maka semua pihak yang bertanggungjawab dan terkait dengan pelaksanaan pendidikan dasar = pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan orangtua atau keluarga = diharapkan mampu menindaklanjuti temuan, analisis, dan kesimpulan penelitian ini dalam rangka membuka akses yang luas kepada seluruh masyarakat, khususnya anak-anak keluarga miskin, untuk mendapatkan hak-hak dasar dan konstitusional mereka terhadap pendidikan. Dalam konteks itu, secara khusus, kepada semua pihak = pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, maupun orangtua atau keluarga = diharapkan bersedia memperhatikan dan menindaklanjuti saran-saran berikut:

1. Pemerintah

Amanah konstitusi, baik dalam hal kewajiban menyelenggarakan pendidikan maupun kewajiban mendanainya, hendaknya dilaksanakan pemerintah secara nyata dan sungguh-sungguh. Dalam kerangka itu, pemerataan akses terhadap pendidikan dasar bagi semua warga negara, tidak terkecuali warga miskin, harus diupayakan secara nyata. Agar warga miskin benar-benar memperoleh aksesnya terhadap pendidikan dasar, maka program-program pemberian bantuan kepada mereka harus diprioritaskan. Untuk itu, pemberian beasiswa kepada seluruh anak usia pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) harus benar-benar menyentuh dan bisa dinikmati warga miskin:

Dari sisi besarannya, program bantuan yang diberikan pemerintah hendaknya benar-benar mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan dasar anak warga miskin yang setidaknya mencakup SPP, buku teks/pelajaran, buku dan alat tulis, pakaian seragam dan olahraga, biaya transportasi (khususnya bagi wilayah yang jauh dari sekolah/madrasah), dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi celah yang memungkinkan bagi menghambat akses anak warga miskin terhadap pendidikan dasar:

Dari sisi pendistribusian bantuan, kebijakan populis pemerintah yang memberikan dana BOS untuk seluruh siswa, tidak terkecuali

miskin atau kaya, sudah saatnya diubah dengan memberikan seluruh dana BOS hanya kepada anak-anak warga miskin. Definisi indikator kemiskinan yang terukur dan transparan dijadikan patokan dalam pemberian bantuan BOS kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dana BOS benar-benar sasaran dan bersifat fungsional dalam membantu warga miskin mendapatkan hak ereka terhadap pendidikan dasar.

Kemudian dari sisi proses pendistribusian bantuan, ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh pemerintah: (1) disalurkan langsung ke sekolah atau madrasah, (2) disalurkan melalui kelembagaan di tingkat kelurahan, RT, atau RW; (3) disalurkan langsung kepada orang tua keluarga miskin melalui sistem pembukaan rekening bank atas nama warga yang bersangkutan. Tentu saja, masing-masing alternatif pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, pemerintah dan institusi terkait harus merumuskan sistem dan mekanisme pengawasan pendistribusian bantuan yang terukur, jelas, dan transparan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komite sekolah/madrasah, dan orangtua siswa.

2. Sekolah/Madrasah

Dalam upaya menjamin agar semua anak warga miskin memperoleh haknya terhadap pendidikan dasar, maka sebagai

lembaga pelaksana operasional pendidikan dasar, sekolah/madrasah hendaknya senantiasa berupaya memfasilitasi pencarian dan pemberian bantuan kepada anak warga miskin. Dalam konteks pencarian dana, sekolah/madrasah idealnya menjalin kerjasama yang luas dengan berbagai pihak yang memungkinkan untuk memberikan dan membuka akses pemberian bantuan pembiayaan pendidikan, seperti dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), organisasi sosial dan keagamaan, organisasi profesi, dan para pengusaha serta dermawan Muslim. Dengan demikian, di masa mendatang, pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber pembiayaan pendidikan, khususnya dalam meringankan beban warga miskin.

Dalam konteks penyaluran dana bantuan pembiayaan, sekolah/madrasah hendaknya benar-benar bersikap amanah, jujur, dan transparan. Hanya dengan perilaku amanah, jujur, dan transparan penyaluran dana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, dari satu sisi, berbagai bentuk penyimpangan atau penyelewengan dapat dihindari. Sedangkan dari sisi lain, perilaku amanah, jujur, dan transparan tersebut akan sangat membantu warga miskin dalam memperoleh hak-hak mereka terhadap pendidikan dasar.

3. Pengusaha dan Dermawan Muslim

Sensitivitas dan rasa kepedulian terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kelanjutan pendidikan anak warga miskin dan

tidak mampu, hendaknya dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks ini, selain pemberian bantuan beasiswa, program anak asuh dinilai sangat fungsional untuk membuka akses yang luas kepada anak-anak keluarga miskin terhadap pendidikan dasar. Proses pemberian bantuan terhadap anak asuh seyogyanya diberikan secara langsung kepada keluarga miskin, tanpa melalui pihak ketiga. Nilai positifnya antara lain adalah: (1) bantuan bisa diberikan secara tepat sasaran; (2) pengawasan atau kontrol penggunaan dana bisa dilakukan secara langsung; (3) bila sewaktu-waktu terjadi perubahan dalam hal kebutuhan pembiayaan, seperti kenaikan biaya partisipasi pendidikan atau penambahan fasilitas dan peralatan sekolah, orangtua asuh dapat secara langsung mempertimbangkan dan memberikannya; dan (4) bila sewaktu-waktu terjadi penyelewengan penggunaan dana, orangtua dengan segera dapat mengetahui dan mengarahkannya kembali kepada penggunaan yang seharusnya.

4. *Orangtua atau Keluarga*

Orangtua/ keluarga hendaknya senantiasa menyadari bahwa tugas dan tanggungjawab mendidik anak, terutama pemenuhan hak anak terhadap pendidikan dasar, merupakan tugas dan tanggung jawab utama orangtua/keluarga. Pemerintah, sekolah madrasah, dan masyarakat merupakan penanggung jawab kedua yang berusaha

membantu orangtua/ keluarga dalam memenuhi tugas dan tanggung-jawabnya mendidik anak.

Dalam upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak terhadap pendidikan, khususnya pendidikan dasar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan orangtua/keluarga: (1) senantiasa berupaya menyisakan sebahagian dari penghasilan mereka dengan cara menabung, (2) mengupayakan dan mengarahkan anak melakukan kegiatan produktif yang bisa menghasilkan uang guna membantu membiayai pendidikannya. Kegiatan produktif dimaksud haruslah kegiatan yang tidak mengganggu, apalagi menghambat, proses pendidikan anak. Tentu saja, orangtua/ keluarga harus pula membantu anak menata penggunaan waktunya. Industri kecil rumah tangga (seperti membuat makanan ringan atau kerajinan tangan), mengantar atau menjual koran dan majalah, memfasilitasi penjualan pulsa telepon seluler, menjajakan makanan ringan, dan bekerja *part time* adalah di antara contoh kegiatan produktif yang bisa dilakukan anak; (3) mengupayakan orangtua asuh bagi penyelenggaraan pendidikan anak. Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengkomunikasikan atau meminta kesediaan kaum kerabat yang memiliki kemampuan finansial atau mengajukan permohonan kepada hartawan dan dermawan Muslim; (4) mengajukan permohonan bantuan beasiswa untuk mendanai pendidikan anak

kepada pemerintah, perusahaan negara dan swasta, atau melalui organisasi-organisasi sosial, keagamaan, dan profesi.

Ketika bantuan pembiayaan diperoleh, suatu hal yang tidak boleh diabaikan orangtua adalah memanfaatkan atau menggunakan dana tersebut benar-benar untuk keperluan pendidikan anak. Sikap amanah, jujur, dan transparan yang disertai dengan ungkapan terima kasih, merupakan prasyarat fungsionalisasi bantuan dan jaminan bagi keberlanjutannya. Dengan perilaku demikian, berbagai pihak yang *concern* dengan pendidikan anak akan senantiasa merasa terpanggil dan bergairah untuk membantu.

Sisi lain yang hendaknya tidak terlepas dari perhatian dan tanggungjawab orangtua adalah membimbing secara langsung dan kontiniu semua aktivitas pembelajaran anak di rumah guna mendukung pelaksanaan dan penyelesaian studinya di lembaga-lembaga pendidikan dasar. Tanpa perhatian dan penunahan tanggungjawab ini, anak akan sulit menyelesaikan studinya secara berhasil.

Pustaka Acuan

Abdul Muhyi Batubara, *Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Lingkungan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Medan* (Medan: Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, 2006):

A. Achsin, *Media Pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar* (Ujung Pandang: IKIP Ujung Pandang, 1986):

Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006):

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 'Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Sumatera Utara' dalam *Berita Resmi Statistik* (No: 07/03/12/Th. X, 29 Maret 2007):

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Pelaksanaan Rumah Tangga Miskin/ Sensus Kemiskinan oleh BPS* (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2005):

Badan Pusat Statistik, 'Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006' dalam *Berita Resmi Statistik* (No: 47/ IX/ 1 September 2006):

Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2006* (Medan: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2007):

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial RI, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia* (Jakarta: BPS, 2002):

Dadang Iskandar, 'Problematika Penyaluran BOS, dalam *Pikiran Rakyat* (edisi Kamis, 18 Januari 2007):

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan BOS* (Jakarta: Diknas dan Depag RI, 2005):

Diding Kurniady, *Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar Dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Deskriptif di Dinas Kota Bandung*, penelitian Tesis, Tersedia online pada <http://sps.upi.edu/v3/?page=abstrak&option=tesis&action=view&id=029808>. Diakses pada tanggal 2 Nopember 2007:

David Cox, 'Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in The Asia-Pacific Region' Makalah disampaikan pada *International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia* (Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2004):

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* cet. Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2006):

Frank Ellis, 'Household Strategies and Rural Livelihood Diversification' dalam *The Journal of Development Studies*, (Vol. 35, No.1):

Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007):

H. Hartono dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001):

http://www.ditperta1s.net/06/download/contoh_desainkurikulum_pgmi.pdf

<http://sumut.bps.go.id/pop/2006/pop.05.html>

<http://sumut.bps.go.id/pop/2006/pop.05.html>:

http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaNasion&cop=detail_berita&id=628

<http://www.kapanlagi.com/h/00000077500.html>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 2001).

Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencana Pembangunan Nasional, *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008* (Jakarta: Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2007).

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989).

Newsletter Smeru, Nomor 17, Januari-Maret 2006.

Sabaruddin Siagian, 'Kompensasi BBM dan Pendidikan Gratis' online dalam http://www.frelist.org/archives/list_indonesia/03-2005/msg02476.html. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2007.

S. Menno dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

Suharto et.al, *Menerapkan Pemandu: Perlindungan Masyarakat Miskin Terpadu* (Bandung: STKS Press, 2004).

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2002).

Suharto Edi, 'Paradigma Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial', Makalah pada Pendidikan dan Pelatihan mengenai Pendekatan Makro dan Mikro dalam Pekerjaan Sosial pada 27 Juli 2004 dan 13 Oktober 2004 (Banten dan Pangkal Pinang, 2004).

Surat Resmi Badan Pusat Statistik kota Medan Nomor 12752005 tentang Data Rumah Tangga Miskin (Kondisi 15 Desember 2006) tanggal 11 Januari 2007.

Tatak Prapti Ujijati, 'Reformasi Pendidikan Dasar di Indonesia' dalam *Policy Assessment Juni 2005 The Indonesian Institute* Tersedia online di <http://www.Center for Public Policy Research>. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2007.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Unicef, *Lembar Fakta: Pendidikan Untuk Anak Perempuan di Indonesia* tersedia online pada http://www.unicef.org/indonesia/id/Facts_sheet diakses pada tanggal 11 Oktober 2007:

Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-Teori Sosial Budaya* (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdiknas, 1994):

Z. A. Achmady, 'Pengembangan Pendidikan Dasar dalam Pembangunan Jangka Panjang II' dalam *Rumusan Hasil Diskusi Panel Nasional tentang Penyuksesan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun* (Malang: Universitas Negeri Malang, 1993):

KUESIONER

Pengantar

Kuesioner ini digunakan untuk menghimpun data penelitian yang berjudul **AKSES MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN TERHADAP PENDIDIKAN DASAR: Studi Pada Masyarakat Muslim Kota Medan**. Dalam rangka itu, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu, Sdr/i untuk memberikan informasi sesuai dengan kondisi atau keadaan Bapak/Ibu, Sdr/i yang sesungguhnya. Data atau informasi yang diberikan tidak mengandung unsur penilaian dan tidak akan kami informasikan kepada siapapun, tetapi hanya akan digunakan untuk menghimpun data yang akurat perihal Akses Masyarakat Miskin Perkotaan terhadap Pendidikan Dasar.

Petunjuk Umum

Pencatatan data ke dalam kuesioner ini dilakukan oleh peneliti lapangan, jadi tidak meminta responden (Bapak/Ibu, Sdr/i). Semua data harap diisi di lapangan. Untuk memudahkan dalam pencatatan data, peneliti lapangan diharuskan membawa alat tulis (ballpoint) tinta hitam, dan data harus secara langsung dicatatkan ke dalam lembaran-lembaran kuesioner ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, peneliti lapangan diharapkan menanyakan kembali kepada sumber data dan segera mencatatkan jawaban ke dalam kuesioner. Untuk data tertentu yang tidak mungkin dicatatkan ke dalam kuesioner ini, peneliti lapangan boleh menggunakan lembar atau kertas lainnya.

Perlu diingat bahwa validitas data yang dijamin sangat bergantung pada kecermatan peneliti lapangan dalam menanyakan hal-hal yang diperlukan dan mengkonfirmasikannya kepada sumber data serta kejujuran intelektual dalam mencatatkan data apa adanya.

Kepada sumber data, peneliti lapangan perlu menjelaskan bahwa data atau informasi yang mereka berikan tidak mengandung unsur penilaian dan akan selalu dijaga kerahasiaannya. Perlu dijelaskan bahwa data atau informasi yang dijamin hanya akan digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi tentang Akses Masyarakat Miskin Perkotaan terhadap Pendidikan Dasar: Studi pada Masyarakat Muslim Kota Medan.

Identitas Responden

- Nama Responden
- Alamat Responden
 - Jalan
 - Kelurahan
 - Kecamatan

- Pekerjaan :
- Jumlah Tanggungan :
- Penghasilan :
 - (a) rata-rata perbulan Rp.
 - (b) rata-rata perminggu Rp.
 - (c) rata-rata perhari Rp.
- Latar pendidikan**

(a) SD	(e) MI
(b) SMP	(f) MTs
(c) SMA/SMK	(g) MA/MAK
(d) Perguruan Tinggi	(h) Perguruan Tinggi Agama

* pilih salah satu dan catatlah jumlahnya
 ** beri tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai

Item Pertanyaan

1. Berapa orang anak Bapak/Ibu yang sedang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs) ?
 - a. SD, orang
 - b. MI, orang
 - c. SMP, orang
 - d. MTs, orang
 - e.
2. Apa tujuan Bapak/Ibu memasukkan anak ke pendidikan dasar ?
 - a. Untuk menjadikan mereka anak yang cerdas dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa
 - b. Supaya mereka kelak mudah mendapat pekerjaan
 - c. Agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekal di masa depan
 - d. Agar mereka dapat menulis dan membaca.
 - e.
3. Menurut Bapak/Ibu, ada atau tidak manfaat pendidikan dasar ?
 - a. Ada, yaitu agar anak berguna bagi orang tua, agama, nusa, dan bangsa.
 - b. Ada, karena dengan waktu 9 tahun anak akan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan
 - c. Ada, karena dengan memperoleh pendidikan dasar, kepribadian anak dapat dibentuk menjadi pribadi yang baik
 - d. Saya tidak tahu, karena tamat pendidikan dasar belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak
 - e.
4. Jika anak Bapak/Ibu mau masuk sekolah, ke lembaga pendidikan mana dimasukkan, apakah ke MI dan MTs atau ke SD dan SMP? Kemudian apa alasannya ?
 - a. Saya akan masukkan ke SD dan SMP, karena prospek masa depan anak akan lebih baik dibandingkan sekolah ke MI dan MTs.
 - b. Saya memilih SD dan SMP, karena belajar di madrasah kurang menjanjikan pekerjaan yang layak
 - c. Saya lebih suka memasukkannya ke MI dan MTs, karena materi pelajarannya dapat mengarahkan anak mengetahui dan mengamalkan ajaran Islam.

d. Saya akan memasukkan ke SD dan SMP, kemudian sore hari ke sekolah mengaji. Karena yang penting menurut saya anak masuk SD dan SMP, sedangkan sekolah madrasah hanya sampingan saja (pendukung):

e.

5. Menurut Bapak/Ibu, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat perlu atau tidak? Apa alasannya?

a. Sangat perlu, sebab pendidikan merupakan bekal untuk masa depan

b. Kurang perlu, karena banyak saya lihat tamatan lembaga pendidikan tidak mendapat pekerjaan alias menganggur

c. Pendidikan banyak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Karena tidak ada perubahan perilaku atau akhlak anak-anak

d. Sebenarnya perlu, namun karena tidak ada biaya maka anak tidak bisa sekolah

e.

6. Setelah anak menamatkan pendidikan dasar, apa ada rencana Bapak/Ibu melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi?

a. Ada, tapi tidak ada biaya

b. Karena tidak ada biaya, maka kami akan membesarkan anak-anak dan mendidik mereka di rumah saja

c. Tidak berniat, sebab untuk menamatkan pendidikan dasar saja kami sudah hutang sana-sini

d. Kalau anak saya sudah tamat SMP/MTs, kami carikan dia pekerjaan. Agar dia bisa membantu biaya hidup kami sehari-hari

e.

7. Menurut Bapak/Ibu, pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, sekolah, atau masyarakat? Apa alasannya?

a. Orang tua, karena menerima amanah langsung dari Allah untuk mendidik anak dan menjauhkan mereka dari api neraka.

b. Tanggung jawab pemerintah, karena undang-undang dasar menyatakan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dan telah memprogramkan wajib pendidikan dasar 9 tahun

c. Sekolah, sebab kita sudah susah payah membiayainya

d. Ketiganya, karena anak adalah amanah Allah dan kewajiban keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mendidiknya.

e.

8. Jika anak Bapak/Ibu pulang dari sekolah, apakah di rumah Bapak/Ibu juga membantu mereka mengulang pelajarannya atau mengerjakan PR?

a. Tidak, karena saya sibuk dengan pekerjaan

- b. Saya hanya menyuruh anak agar baik-baik belajar di sekolah. Jika tiba di rumah, dia saya suruh membantu bekerja
 - c. Saya serahkan semuanya kepada kemauan dan kesungguhan anak
 - d. Saya suruh mereka mengulang pelajaran di rumah, dan saya akan membantu mengerjakan apa yang mereka tidak pahami:
 - e.
9. Menurut Bapak/Ibu, mana yang lebih penting, mencari kerja untuk anak atau menyekolahkan mereka ?
- a. Mencarikan kerja anak, karena pekerjaan lebih utama dari pendidikan.
 - b. Menyekolahkan mereka, karena dengan bekal pendidikan anak akan siap menjalani kehidupan di masa depan
 - c. Kedua-duanya sangat penting, tetapi kalau tamat sekolah tidak dapat kerja hanya pemborosan
 - d. Bagi saya, yang penting anak dapat kerja, karena tujuan akhir dari sekolah untuk memudahkan anak mendapat kerja
 - e.
10. Jika Bapak/Ibu memiliki anak laki-laki dan perempuan, bagaimana mengatur pendidikan mereka?
- a. Untuk anak perempuan, kalau sudah tamat pendidikan dasar akan saya carikan jodohnya
 - b. Untuk anak laki-laki, akan saya carikan kerja agar dapat membantu ekonomi keluarga
 - c. Sedapat mungkin akan saya sekolahkan keduanya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
 - d. Kalau ada bantuan dari pemerintah, akan saya sekolahkan keduanya
 - e.
11. Apakah Bapak/bu mempunyai anak yang putus sekolah ?
- a. Ya, ada, orang putus sekolah dari SD
 - b. Ya, ada, orang putus sekolah dari MI
 - c. Ya, ada, orang putus sekolah dari SMP
 - d. Ya, ada, orang putus sekolah dari MTs
 - e.
12. Apa sebab mereka putus sekolah ?
- a. Karena kami sudah tidak sanggup lagi membiayainya
 - b. Karena tinggal kelas
 - c. Karena anak saya sudah mendapatkan kerja yang bisa membantu ekonomi keluarga

- d. Karena tidak sanggup membeli buku pelajaran dan alat perlengkapan sekolah
e.

13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun? Bila mengetahui, dari mana informasi tersebut diperoleh?

- a. Tahu, melalui televisi
b. Tahu, melalui surat kabar
c. Tahu, melalui percakapan tetangga
d. Tahu, melalui kepala lingkungan dan petugas kelurahan
e.

14. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan wajib pendidikan dasar 9 tahun?

- a. Setiap anak yang berusia 9 tahun wajib mendaftar ke sekolah
b. Anak gratis bersekolah selama 9 tahun
c. Anak usia sekolah wajib mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 9 tahun
d. Pemerintah memberikan pelayanan pendidikan gratis kepada anak usia sekolah sampai tamat SMP atau MTs
e.

15. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apa tujuan pendidikan dasar?

- a. Agar anak pandai membaca, menulis, dan berhitung
b. Agar anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap mental sebagai bekal mereka untuk menjalani kehidupan masa depan
c. Agar anak bisa mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang pendidikan menengah
d.

16. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah anak wajib memperoleh pendidikan dasar?

- a. Ya, wajib karena merupakan salah satu kebutuhan dasar anak
b. Ya, wajib karena dijamin Undang-Undang Dasar
c. Ya wajib, karena
d. Tidak, karena hak asasi seseorang mau sekolah atau tidak
e.

17. Selama ini, bagaimana Bapak/Ibu menanggulangi biaya pendidikan anak-anak yang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun?

- a. Saya membiayainya sendiri

- b. Saya mendapatkan bantuan dari famili atau keluarga
- c. Saya mendapatkan bantuan dari pemerintah
- d. Saya membiayainya dari bantuan Bazis dan masyarakat
- e.

18. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kalau tahu, darimana informasi diperoleh ?

- a. Saya tidak tahu apa itu dana BOS
- b. Yang saya tahu, BOS adalah dana bantuan untuk biaya operasional sekolah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk membantu anak-anak agar tetap bisa bersekolah. Saya mendapatkan informasi dari Kepala sekolah
- c. Yang saya tahu, BOS itu bantuan untuk membiayai sekolah anak-anak orang miskin. Saya tahu informasinya dari iklan di televisi dan surat kabar/keran
- d. Yang saya dengar, BOS itu bantuan kepada orang miskin agar anak-anaknya tetap bisa bersekolah dengan gratis. Saya mendapat informasinya dari tetangga yang membicarakan hal itu
- e.

19. Apakah Bapak/Ibu pernah diundang untuk menghadiri rapat di sekolah yang membicarakan tentang dana BOS ?

- a. Saya belum pernah diundang untuk menghadiri acara semacam itu
- b. Saya dengar katanya ada undangan, tetapi belum pernah sampai kepada saya
- c. Ada undangan, tapi saya tidak bisa datang karena harus bekerja mencari nafkah
- d. Ada undangan, tapi saya tidak datang karena yang penting bagi saya bukan kehadiran dalam rapat, tetapi cairnya dana BOS sesegera mungkin agar anak saya bisa dibantu untuk tetap bersekolah
- e.

20. Sepanjang yang Bapak/Ibu ketahui tentang BOS, bagaimana prosedur atau tata cara mendapatkan dana BOS tersebut ?

- a. Saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan dana BOS
- b. Saya diundang kepala sekolah untuk membicarakan dana BOS, kemudian sekolah yang membagikannya secara langsung
- c. Saya tidak tahu caranya, yang saya tahu anak saya bebas membayar SPP untuk beberapa bulan dan mendapat bantuan beberapa buku pelajaran
- d. Saya diminta membuat surat miskin dari kelurahan untuk persyaratan mendapatkan bantuan dana BOS dari sekolah
- e.

21. Jika ada anak Bapak/Ibu yang mendapatkan dana BOS dari sekolah, dalam bentuk apa bantuan dana BOS itu diberikan ?
- Uang tunai, sebesar Rp.
 - Bebas uang sekolah/ SPP untuk bulan
 - Gratis atau bebas uang sekolah selama bulan
 - Bantuan buku teks atau buku pelajaran untuk bidang studi
 -
22. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan, siapa saja yang berhak mendapatkan dana BOS tersebut ?
- Saya tidak tahu untuk siapa saja dana itu diberikan.
 - Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu
 - Seluruh anak yang bersekolah pada pendidikan dasar, walaupun dia bukan dari keluarga miskin
 - Selain untuk anak keluarga miskin atau kurang mampu, dana BOS juga untuk keperluan insentif atau tunjangan kesejahteraan guru dan penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah
 -
23. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka ? Kalau tahu, dari mana Bapak/ Ibu mendengar informasinya ?
- Saya tidak tahu
 - Yang saya tahu Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, tetapi didampingi/ dipandu oleh beberapa orang pembimbing
 - Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka adalah program belajar pendidikan dasar yang dilaksanakan di luar pendidikan persekolahan, diberi buku gratis dan bisa mengikuti ujian persamaan Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka itu
 - program ujian ulangan untuk anak-anak yang tidak lulus Ujian Nasional
 - SMP
24. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka ?
- Dari penjelasan guru dan kepala sekolah
 - Dari koran dan televisi
 - Mendengar dari tetangga yang ikut Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka
 - Dari penjelasan Lurah, Kepling, atau petugas kelurahan**

* Tuliskan jumlah dana tunai yang diterima
 ** coret yang tidak perlu

- e.
25. Jika Bapak/Ibu tahu tentang kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka, menurut Bapak/Ibu apa manfaatnya?
- Untuk membantu masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah formal
 - Untuk mendapatkan ijazah yang bisa dipakai sebagai syarat melanjutkan studi ke SMA
 - Untuk mendapatkan ijazah SMP karena tidak lulus UN
 - Untuk mendapatkan ijazah yang bisa dipakai sebagai syarat mendapat pekerjaan
 -
26. Berdasarkan pengalaman atau sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah anak-anak yang mengikuti kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka dipungut biaya?
- Tidak, semuanya serba gratis
 - Katanya gratis, tapi kenyataannya tetap harus membayar
 - Hanya dikutip biaya untuk membayar bahan atau modul belajar
 - Hanya membayar administrasi untuk ujian dan ijazah Paket C
 -
27. Sepengetahuan Bapak/Ibu, sampai usia berapa tahun boleh ikut kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka?
- Sampai berapa tahunpun dibolehkan
 - Hanya untuk anak usia SMP
 - Usianya dibatasi sampai kelas tiga SMA
 - Saya tidak tahu
 -
28. Apakah lulusan dari program kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka bisa melanjutkan ke sekolah formal, seperti SMA atau MA?
- Saya tidak tahu
 - Bisa, karena ijazahnya setara dengan ijazah SMP
 - Hanya bisa digunakan untuk mengikuti kejar Paket B
 - Bisa, karena salah satu tujuan kejar paket C adalah agar anak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
 -
29. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apa persyaratan untuk mengikuti program kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka?
- Tidak ada persyaratan apapun, langsung mendaftar saja
 - Persyaratannya harus sudah lulus SD
 - Persyaratannya harus sudah duduk di kelas tiga SMP tapi tidak lulus UN

Akses Masyarakat Miskin Kota Terhadap Pendidikan Dasar 10

- d. Saya tidak tahu apa saja persyaratannya
e.
30. Sepengetahuan Bapak/Ibu, bila ingin mengikuti program kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka kemana harus mendaftarkan diri ?
a. Dinas Pendidikan kecamatan/ kota
b. Bagian PLS Dinas Pendidikan kecamatan/ kota
c. Kantor Kelurahan
d. Saya tidak tahu
e.
31. Apakah Bapak/Ibu memiliki anak yang sedang atau telah mengikuti kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka?
a. Ada, orang sedang mengikuti*
b. Ada, orang telah selesai mengikuti*
c. Tidak ada
d.
32. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
a. Bantuan dana tunai dari pemerintah untuk semua masyarakat sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM
b. Bantuan dana tunai dari pemerintah yang hanya diperuntukkan bagi warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
c. Yang saya tahu, BLT itu bantuan dana tunai dari pemerintah agar masyarakat miskin bisa membeli BBM
d. Saya tidak tahu apa itu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
e.
33. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang BLT ?
a. Dari penjelasan Lurah, Kepala lingkungan atau petugas kelurahan
b. Dari obrolan dengan tetangga
c. Dari membaca koran
d. Dari menonton televisi
e.
34. Bagaimana persyaratan mendapatkan dana BLT ?
a. Saya tidak begitu paham, karena persyaratannya sangat rumit
b. Harus ada surat miskin yang dikeluarkan kelurahan
c. Mendaftarkan diri ke Kepling, kelurahan, atau kecamatan

* Tuliskan berapa orang jumlahnya
* Coret yang tidak perlu

d. Saya tidak tahu, setahunnya saya terdaftar sebagai warga yang mendapatkan BLT

e.

35. Berapa jumlah BLT yang Bapak/Ibu terima?

a. Rp 100 ribu/ bulan, dan diterima sebulan sekali

b. Rp 100 ribu/ bulan, dan diterima setiap tiga bulan sekali

c. Rp 100 ribu/ bulan, tetapi tidak menentu jadwal penerimaannya

d. Rp 100 ribu/ bulan, dan diterima setiap tiga bulan sekali setelah dipotong biaya administrasi**

e.

36. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BLT tersebut memadai untuk membantu biaya hidup?

a. Sangat tidak cukup, karena harga kebutuhan pokok terus meningkat

b. Tidak cukup, karena banyaknya komponen biaya hidup yang harus dipenuhi

c. Tidak mencukupi, sebab untuk memenuhi kebutuhan biaya BBM keluarga saja masih kurang

d. Menurut saya hanya cukup untuk membeli kebutuhan BBM keluarga

e.

37. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bantuan beras bagi warga miskin (raskin)?

a. Bantuan beras yang bisa dibeli dengan harga murah

b. Bantuan beras yang bisa dibeli dengan harga Rp. 1000,-/ kg

c. Bantuan pemberian beras gratis bagi warga miskin

d. Saya tidak tahu apa itu bantuan beras raskin

e.

38. Dari mana bapak/ ibu memperoleh informasi tentang bantuan raskin?

a. Lurah dan kepala lingkungan

b. Tetangga

c. Televisi dan radio

d. Surat Kabar

e.

39. Sepengetahuan bapak/ibu berapa besarnya bantuan beras raskin tersebut?

a. Sebanyak banyaknya, sesuai dengan kemampuan warga miskin dalam membeli

b. Sebanyak 10 Kg/ keluarga

** Catatikan di sebelahnya berapa besar potongan biaya administrasi

- c. Sebanyak 6 Kg/ keluarga
d. Saya tidak tahu
e.
40. Sepengetahuan bapak/ ibu bagaimana tata cara memperoleh bantuan beras raskin
a. Datang ke kelurahan untuk meminta surat miskin lalu surat itu ditunjukkan ketika membeli raskin
b. Cukup lapor pada keping dan minta jatah raskin
c. Cukup dengan mendatangi tempat-tempat yang menjual raskin
d. Saya tidak tahu
e.
41. Apakah bapak/ ibu mengetahui informasi tentang layanan kesehatan gratis bagi warga miskin?
a. Ya, saya tahu
b. Saya tidak tahu
c.
42. Dari mana bapak/ ibu memperoleh informasi tentang bantuan layanan kesehatan gratis bagi warga miskin?
a. Lurah dan kepala lingkungan
b. Tetangga
c. Televisi dan radio
d. Petugas Puskesmas
e. Surat Kabar
f.
43. Dari seluruh anak Bapak/Ibu yang berada pada usia pendidikan dasar, berapa orang yang sedang bersekolah ?
a. orang dan semuanya bersekolah***
b. orang, tetapi orang tidak sekolah
c.
44. Apa sebab anak Bapak/Ibu tidak menamatkan pendidikan dasar 9 tahun ?
a. Karena kami tidak punya biaya untuk keperluan sekolah mereka
b. Karena kami tidak mendapatkan bantuan untuk membiayai sekolah mereka
c. Ketika akan ujian, kami tidak sanggup melunasi SPP dan biaya ujuannya
d. Anak tidak mau sekolah lagi dikarenakan tidak punya buku pelajaran
e.

*** Tuliskan jumlahnya

Akses Masyarakat Miskin Kota Terhadap Pendidikan Dasar 13

45. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu waktu mendaftarkan anak masuk pendidikan dasar?
- Sangat rumit karena persyaratannya harus ada akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan tamat TK, dan lain-lain
 - Tidak rumit, hanya cukup mendaftarkan dan mengisi formulir yang disediakan sekolah
 - Karena rumit, saya minta bantuan kepada tetangga untuk mendaftarkan anak saya
 - Menurut saya cukup mudah, yang penting anak sudah usia wajib pendidikan dasar
 -
46. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, berapa besar biaya yang harus dibayarkan ke sekolah ketika tahun pertama mendaftarkan anak ke pendidikan dasar?
- Untuk SD, sebesar Rp.
 - Untuk MI, sebesar Rp.
 - Untuk SMP, sebesar Rp.
 - Untuk MTs, sebesar Rp.
 -
47. Untuk keperluan apa saja uang yang dibayarkan tersebut?
- Untuk formulir dan administrasi pendaftaran
 - Untuk administrasi pendaftaran, formulir, dan uang pembangunan
 - Untuk biaya pendaftaran, pembelian seragam sekolah dan seragam olah raga
 - Untuk biaya pendaftaran, pembelian seragam sekolah, seragam olah raga, sepatu, dan pembelian buku pelajaran
 -
48. Berdasarkan pengalaman, berapa besar biaya yang harus Bapak/Ibu belanjakan untuk memenuhi keperluan anak ketika tahun pertama mendaftarkan di pendidikan dasar?
- Untuk SD, sebesar Rp.*
 - Untuk MI, sebesar Rp.
 - Untuk SMP, sebesar Rp.
 - Untuk MTs, sebesar Rp.
 -
49. Untuk keperluan apa saja uang yang dibelanjakan tersebut?
- Untuk pembayaran uang pembangunan
 - Untuk pembelian seragam sekolah

* Tuliskan berapa besar jumlahnya

- c. Untuk pembelian seragam sekolah dan seragam olah raga
d. Untuk pembelian seragam sekolah, seragam olah raga, sepatu, buku dan alat tulis, dan buku pelajaran
e.
50. Berdasarkan pengalaman anak Bapak/Ibu selama mengikuti pendidikan dasar, pernahkan mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kurang menyenangkan dari sekolah?
a. Pernah, ketika di SD, bentuk perlakuan diskriminatifnya
..... dan perlakuan kurang menyenangkannya
b. Pernah, ketika di MI, bentuk perlakuan diskriminatifnya dan
perlakuan kurang menyenangkannya
c. Pernah, ketika di SMP, bentuk perlakuan diskriminatifnya
dan perlakuan kurang menyenangkannya
d. Pernah, ketika di MTs, bentuk perlakuan diskriminatifnya
dan perlakuan kurang menyenangkannya
e.
51. Jika pernah menerima perlakuan tersebut, apakah anak Bapak/Ibu sampai saat ini masih tetap bersekolah?
a. Ya, masih bersekolah di tempat yang sama
b. Ya, masih tetapi sudah pindah sekolah
c. Tidak, karena anak menolak untuk bersekolah lagi
d.
52. Saran Bapak/Ibu agar anak-anak warga kurang mampu/ miskin tetap bisa memperoleh pendidikan dasar:
a. Kepada pemerintah pusat:
b. Kepada pemerintah daerah:
c. Kepada Departemen Pendidikan Nasional:
d. Kepada Departemen Agama RI:
e. Kepada masyarakat muslim:
f. Institusi atau pihak lainnya:

.. Boleh menggunakan lembar catatan lainnya
.. Tuliskan institusi atau pihak-pihak lainnya tersebut

